



PROFIL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2016/2017
KABUPATEN KAPUAS HULU

Sumber:

.....

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUASHULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KABUPATEN KAPUASHULU
2017

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Petrus Kusnadi, S.Sos,M.Si
Pengarah	: M. Jumran H, S.Pd,M.Si
Ketua	: Muhlisin
Sekretaris/ Penulis	: Suhardi. A, S.E
Anggota	: 1. Daeng Erni Askupah 2. M. Rahman, S.Pd 3. Eko Priyono, A.Md
Petugas Pengumpul Data	: Adnan
Petugas Validasi dan	: Toni, A.Md
Verifikasi data	

KATA PENGANTAR

Buku “Profil Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015/2016” ini merupakan salah satu cara melaksanakan analisis terhadap data pendidikan dasar dan menengah dan mengintegrasikan dengan data nonpendidikan.

Profil Pendidikan Dasar dan Menengah menyajikan 4 Bab, yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Konsep Dasar Profil Pendidikan, Bab III Keadaan Umum yang terdiri dari Peta Kabupaten/Kota atau Provinsi, Nonpendidikan, dan Pendidikan, Bab IV Kinerja Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Bab IV Penutup yang berisi Simpulan dan Saran.

Profil Pendidikan Dasar dan Menengah bersumber pada data pendidikan jenjang SD yang terdiri dari SD dan MI, jenjang SMP yang terdiri dari SMP dan MTs; jenjang SM yang terdiri dari SMA, SMK, dan MA. Profil Pendidikan Dasar dan Menengah disusun dengan mendasarkan pada Misi Pendidikan 5K, yaitu ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas layanan pendidikan, kesetaraan layanan pendidikan, dan kepastian layanan pendidikan.

Buku Profil Pendidikan Dasar dan Menengah ini menghasilkan kinerja pendidikan berdasarkan Misi Pendidikan 5K menurut jenjang pendidikan. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa kinerja misi K1 dengan nilai 57,54 termasuk kategori kurang, misi K2 dengan nilai 64,75 termasuk kategori kurang misi K3 dengan nilai 34,95 termasuk kategori kurang misi K4 dengan nilai 78,95 termasuk kategori kurang dan misi K5 dengan nilai 85,87 termasuk kategori madya. Selanjutnya, bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka jenjang SD dengan nilai 63,99 termasuk kategori kurang, jenjang SMP dengan nilai 67,42 termasuk kategori kurang, dan jenjang SM dengan nilai 61,82 termasuk kategori kurang sehingga dikdasmen dengan nilai 64,41 termasuk kategori kurang.

Berdasarkan analisis indikator yang menghasilkan kinerja pendidikan maka kinerja ini dapat dijadikan bahan informasi yang berguna bagi pimpinan untuk memperbaiki kondisi prasarana dan sumber daya manusia pendidikan serta secara tidak langsung dapat digunakan secara makro sebagai bahan dalam menyusun rencana dan program pembangunan pendidikan serta penyusunan kebijakan bagi pimpinan.

Akhirnya, mudah-mudahan buku ini dapat digunakan secara maksimal dalam perencanaan pendidikan di masa mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu

PETRUS KUSNADI, S.SOS.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Manfaat

BAB II : KONSEP DASAR PROFIL PENDIDIKAN

BAB III : KEADAAN UMUM

- A. Peta Kabupaten/Kota atau Provinsi
- B. Nonpendidikan
- C. Pendidikan
 - 1. Jenjang SD (SD dan MI)
 - 2. Jenjang SMP (SMP dan MTs)
 - 3. Jenjang SM (SM dan MA)
 - 4. PAUD dan Nonformal

BAB IV : KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- A. Ketersediaan Layanan Pendidikan: Misi K1
- B. Keterjangkauan Layanan Pendidikan: Misi K2
- C. Kualitas Layanan Pendidikan: Misi K3
- D. Kesetaraan Layanan Pendidikan: Misi K4
- E. Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K5

BAB V : PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB II

- Tabel 2.1 : Standar untuk Melakukan Konversi Masing-masing Indikator
- Tabel 2.2 : Jenis Kinerja Berdasarkan Kategori Wajar Dikdas 9 Tahun

BAB III

- Tabel 3.1 : Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota atau Provinsi
- Tabel 3.2 : Keadaan Penduduk menurut Kelompok Usia
- Tabel 3.3 : Tingkat Pendidikan Penduduk
- Tabel 3.4 : Tingkat Kepandaian Membaca/Menulis dan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
- Tabel 3.5 : Keadaan Geografi
- Tabel 3.6 : Keadaan Ekonomi
- Tabel 3.7 : Biaya Langsung dan SKPD
- Tabel 3.8 : Mata Pencarian Penduduk
- Tabel 3.9 : Keadaan Keagamaan dan Kesehatan
- Tabel 3.10 : Data Prasarana SD dan MI
- Tabel 3.11 : Kekurangan atau Kelebihan Prasarana SD dan MI
- Tabel 3.12 : Data Sumber Daya Manusia SD dan MI
- Tabel 3.13 : Data Prasarana SMP dan MTs
- Tabel 3.14 : Kekurangan atau Kelebihan Prasarana SMP dan MTs
- Tabel 3.15 : Data Sumber Daya Manusia SMP dan MTs
- Tabel 3.16 : Data Prasarana SM dan MA
- Tabel 3.17 : Kekurangan atau Kelebihan Prasarana SM dan MA
- Tabel 3.18 : Data Sumber Daya Manusia SM dan MA
- Tabel 3.19 : Data PAUD dan Nonformal

BAB IV

- Tabel 4.1 : Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan: Misi K1
- Tabel 4.2 : Kinerja Ketersediaan Layanan Pendidikan: Misi K1
- Tabel 4.3 : Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan: Misi K2
- Tabel 4.4 : Kinerja Keterjangkauan Layanan Pendidikan: Misi K2
- Tabel 4.5 : Indikator Kualitas Layanan Pendidikan: Misi K3
- Tabel 4.6 : Kinerja Kualitas Layanan Pendidikan: Misi K3
- Tabel 4.7 : Indikator Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K4
- Tabel 4.8 : Kinerja Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K4
- Tabel 4.9 : Indikator Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K5
- Tabel 4.10 : Kinerja Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K5
- Tabel 4.11 : Kinerja Dikdasmen Berdasarkan Misi Pendidikan 5K

DAFTAR PETA/GRAFIK

Halaman

BAB III

- Peta 3.1 : Peta Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi*
Grafik 3.1 : Tingkat Pendidikan Penduduk
Grafik 3.2 : Keadaan Ekonomi
Grafik 3.3 : Biaya Langsung Berdasarkan SKPD
Grafik 3.4 : Mata Pencarian Penduduk
Grafik 3.5 : Prasarana Sekolah SD dan MI
Grafik 3.6 : Akreditasi SD dan MI
Grafik 3.7 : Ruang Kelas Milik menurut Kondisi SD dan MI
Grafik 3.8 : Sumber Daya Manusia SD dan MI
Grafik 3.9 : Siswa Usia Sekolah SD dan MI
Grafik 3.10 : Mengulang dan Putus Sekolah SD dan MI
Grafik 3.11 : Kepala sekolah dan Guru menurut Ijazah Tertinggi SD dan MI
Grafik 3.12 : Prasarana Sekolah SMP dan MTs
Grafik 3.13 : Akreditasi SMP dan MTs
Grafik 3.14 : Ruang Kelas Milik menurut Kondisi SMP dan MTs
Grafik 3.15 : Sumber Daya Manusia SMP dan MTs
Grafik 3.16 : Siswa Usia Sekolah SMP dan MTs
Grafik 3.17 : Mengulang dan Putus Sekolah SMP dan MTs
Grafik 3.18 : Kepala sekolah dan Guru menurut Ijazah Tertinggi SMP dan MTs
Grafik 3.19 : Prasarana Sekolah SM dan MA
Grafik 3.20 : Akreditasi SM dan MA
Grafik 3.21 : Ruang Kelas Milik menurut Kondisi SM dan MA
Grafik 3.22 : Sumber Daya Manusia SM dan MA
Grafik 3.23 : Siswa Usia Sekolah SM dan MA
Grafik 3.24 : Mengulang dan Putus Sekolah SM dan MA
Grafik 3.25 : Kepala sekolah dan Guru menurut Ijazah Tertinggi SM dan MA

BAB IV

- Grafik 4.1 : Rasio Pendidikan Dikdasmen*
Grafik 4.2 : Persentase Prasarana Pendidikan
Grafik 4.3 : Persentase Kualitas SDM Pendidikan
Grafik 4.4 : Persentase Kualitas Prasarana Pendidikan
Grafik 4.5 : PG APK dan IPG APK Dikdasmen
Grafik 4.6 : APK, AMM/AM, AB5/AB, dan RLB
Grafik 4.7 : Kinerja Dikdasmen Berdasarkan Misi Pendidikan 5K dan Jenjang Pendidikan
Grafik 4.8 : Kinerja Dikdasmen Berdasarkan Misi Pendidikan 5K
Grafik 4.9 : Kinerja Dikdasmen Menurut Jenjang Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan dimulai dengan penjelasan tentang latar belakang perlunya disusun buku Profil Pendidikan, dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan disusunnya buku ini, dan diakhiri dengan ruang lingkup.

A. Latar Belakang

Dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan di tingkat kabupaten Kapuas Hulu diperlukan data dan informasi yang lengkap. Data dan informasi tersebut tidak hanya menyangkut data di lingkungan Dinas Pendidikan melainkan juga di luar Dinas Pendidikan. Pada kenyataannya, untuk mendapatkan data dan informasi, khususnya di luar Dinas Pendidikan sangat sulit. Hal itu disebabkan karena semua instansi memiliki data masing-masing dan belum ada instansi yang melakukan integrasi terhadap data setiap instansi tersebut. Agar diperoleh data yang terintegrasi, lengkap, dan mutakhir mengenai keadaan pendidikan maka perlu dikaitkan dengan data dan informasi di luar Dinas Pendidikan atau data nonpendidikan seperti administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, transportasi dan komunikasi, serta data lainnya yang relevan. Selain itu, untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui faktor internal pendidikan melainkan juga harus dilihat faktor eksternal lainnya atau di luar pendidikan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, profil pendidikan yang cukup komprehensif di suatu kabupaten/kota atau provinsi dapat dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu, dengan menggunakan profil pendidikan tersebut dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan khususnya perkembangan pendidikan.

Berdasarkan data dan informasi yang komprehensif yang termuat di dalam profil pendidikan dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, dengan menggunakan kinerja yang ada diharapkan dapat dilakukan identifikasi masalah terhadap misi pendidikan 5K, yaitu ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas layanan pendidikan, kesetaraan layanan pendidikan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan. Berdasarkan masalah yang ada maka perlu dilakukan analisis data dan informasi untuk perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang ada.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka permasalahannya adalah:

- 1. Bagaimana menyajikan data dan informasi pendidikan yang terintegrasi?*
- 2. Bagaimana indikator pendidikan berdasarkan misi pendidikan 5K?*
- 3. Bagaimana kinerja pendidikan berdasarkan misi pendidikan 5K?*

C. Tujuan

Berdasarkan pada permasalahan maka terdapat dua tujuan dalam penulisan profil pendidikan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum disusunnya profil pendidikan adalah untuk menghasilkan data dan informasi yang terintegrasi antara data pendidikan dengan data nonpendidikan yang dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan pendidikan.

Tujuan khususnya ada dua, yaitu menghitung indikator pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan misi pendidikan 5K dan menghitung kinerja pendidikan dasar dan menengah berdasarkan misi pendidikan 5K di suatu daerah. Dengan disusunnya kinerja pendidikan maka dapat diketahui masalah yang dihadapi dan sebagai bahan perencanaan yang menyangkut ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas layanan pendidikan, kesetaraan layanan pendidikan, dan kepastian layanan pendidikan.

Setelah diketahui masalah tersebut, diharapkan dapat direkomendasikan cara mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, kinerja pendidikan yang telah dikaitkan dengan faktor eksternal tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunan perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan pendidikan, penyusunan kebijakan operasional pendidikan, dan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya informasi pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi.

D. Ruang Lingkup

Profil ini menyajikan keadaan umum nonpendidikan dan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keadaan umum nonpendidikan yang disajikan meliputi informasi tentang administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, dan sosial budaya dan agama. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan di daerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang pendidikan serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan.

Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja dan analisis profil pendidikan yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator internal dan eksternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk keperluan perencanaan pendidikan. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data dasar, (baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS),

Dinas Pendidikan maupun dari instansi lain) mengenai pendidikan dan data olahan pendidikan yang menghasilkan indikator seperti persentase, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut satuan dan jenjang pendidikan.

E. Manfaat

Dengan disusunnya buku ini diharapkan dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Kapuas Hulu, Bappeda, stakeholder, dan pemerhati pendidikan yang ingin mengetahui tentang data pendidikan serta analisisnya yang dapat digunakan untuk penentuan kebijakan maupun pengambilan keputusan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah.

Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu dan Bappeda dengan tersedianya data pendidikan di setiap kabupaten/kota maupun kecamatan maka dapat digunakan dalam rangka perencanaan pendidikan, penentuan kebijakan, dan pengambilan keputusan tentang pendidikan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Stakeholder dapat memanfaatkan data pendidikan untuk kebutuhan pengembangan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah dipandang dari sudut lainnya. Pemerhati pendidikan dapat memanfaatkan data pendidikan dasar dan menengah untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan pendidikan atau penelitian lainnya yang terkait dengan pendidikan.

BAB II

KONSEP DASAR PROFIL PENDIDIKAN

Profil Pendidikan disusun bersumber pada isian instrumen Profil Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2017 yang menyajikan data pada Tahun 2016/2017. Profil Pendidikan terdiri atas dua variabel, yaitu data dan indikator, terdiri atas dua jenis data, yaitu nonpendidikan dan pendidikan, dan terdiri atas dua jenis indikator, yaitu nonpendidikan dan pendidikan.

Profil Pendidikan mengacu pada visi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) 2017. Berdasarkan visi tersebut terdapat layanan prima pendidikan nasional yang dijabarkan menjadi misi pendidikan 5K. Visi Kemdiknas 2017 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional. Indikator pendidikan yang dimaksud disesuaikan dengan Rencana Strategi (renstra) Kemdiknas dalam rangka Pembangunan Pendidikan 2010-2014 yang terdiri dari tiga pilar kebijakan dan dijabarkan dalam Misi Pendidikan 5K. Misi Pendidikan 5K terdiri atas 1) Misi K1 meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, 2) Misi K2 memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, 3) Misi K3 meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan, 4) Misi K4 mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan 5) Misi K5 menjamin kepastian memperoleh layanan Pendidikan.

Data merupakan satuan terkecil yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf atau simbol yang menggambarkan nilai suatu variabel tertentu sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Angka, huruf atau simbol tersebut sering disebut sebagai data mentah atau besaran yang belum memiliki arti jika belum dilakukan pengolahan atau analisis lebih lanjut. Data yang dimaksudkan adalah data pendidikan yang terdiri dari sekolah, rombongan belajar/kelas, ruang kelas, siswa baru, siswa, lulusan, guru, mengulang, dan putus sekolah.

Indikator merupakan suatu konsep dan sekaligus ukuran. Sebagai konsep, indikator merupakan besaran kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengetahui masukan, proses dan hasil atau dampak dari instrumen kebijakan. Sebagai ukuran, indikator merupakan besaran kuantitatif sebagai hasil pengolahan dari dua atau lebih data dalam waktu yang bersamaan. Secara sederhana, indikator juga didefinisikan sebagai perbandingan antara dua atau lebih variabel data sehingga dapat diinterpretasikan. Indikator pendidikan yang dimaksudkan adalah rasio siswa per sekolah, rasio siswa per kelas, rasio kelas per ruang kelas, persentase perpustakaan, persentase ruang UKS, persentase ruang komputer, persentase tempat olahraga, dan persentase laboratorium.

Data nonpendidikan membahas tentang empat hal, yaitu 1) administrasi pemerintahan dan demografi, 2) tingkat pendidikan penduduk termasuk tingkat kemampuan membaca/menulis, 3) angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, penduduk miskin, serta geografi dan iklim, 4) ekonomi termasuk mata pencaharian penduduk, dan 5) sosial budaya dan agama.

Data pendidikan dirinci menjadi dua variabel, yaitu 1) data prasarana pendidikan dan 2) data sumber daya manusia pendidikan. Data pendidikan membahas tentang data dikdasmen. Dikdasmen terdiri dari tiga jenjang, yaitu sekolah dasar (SD), sekolah

menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah (SM) serta dilengkapi rangkuman dikdasmen. Data prasarana pendidikan terdiri dari 13 variabel dan data sumber daya manusia sebanyak 6 variabel. Prasarana pendidikan dimaksud adalah sekolah, kelompok belajar (kelas), ruang kelas, perpustakaan, ruang usaha kesehatan sekolah (UKS), ruang komputer, tempat olahraga, laboratorium, ruang bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan karier (BP/BK), ruang serba guna, toilet, air bersih, dan listrik. Sumber daya manusia pendidikan adalah siswa baru, siswa, mengulang, putus sekolah, lulusan, dan guru.

Hasil analisis berdasarkan pada indikator pendidikan menggunakan misi pendidikan 5K untuk menghasilkan kinerja pendidikan dasar dan menengah.

Indikator pendidikan termasuk misi K1 terdiri atas delapan jenis, yaitu 1) rasio siswa per sekolah (R-S/Sek), 2) rasio siswa per kelas (R-S/K), 3) rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK), 4) persentase perpustakaan (%Perpus), 5) persentase ruang UKS (%RUKS), 6) persentase ruang komputer (%Rkom), 7) persentase tempat olahraga (%TOR), dan 8) persentase laboratorium (%Lab).

Indikator pendidikan termasuk misi K2 terdiri atas tiga jenis, yaitu 1) tingkat pelayanan sekolah (TPS), 2) daerah terjangkau (DT), dan 3) satuan biaya (SB).

Indikator pendidikan termasuk misi K3 terdiri atas 11 jenis, yaitu 1) persentase siswa baru SD asal TK (%SB TK) (khusus SD), 2) persentase guru layak (%GL), 3) rasio siswa per guru (R-S/G), 4) angka lulusan (AL), 5) angka mengulang (AU), 6) angka putus sekolah (APS), 7) persentase ruang kelas baik (%RKb), 8) persentase perpustakaan baik (%Perpusb), 9) persentase ruang UKS baik (%RUKSb), 10) persentase ruang komputer baik (%Rkomb), 11) persentase tempat olahraga baik (%TORb), dan 12) persentase laboratorium baik (%Lab) (SMP dan SM).

Indikator pendidikan termasuk misi K4 terdiri atas tiga jenis, yaitu 1) perbedaan gender (PG) APK, 2) indeks paritas gender (IPG) APK, dan 3) persentase siswa swasta (%S-Swt).

Indikator pendidikan termasuk misi K5 terdiri atas empat jenis, yaitu 1) angka partisipasi murni (APM)/angka partisipasi kasar (APK), 2) angka masukan murni (AMM) (khusus SD)/angka melanjutkan (AM) (SMP dan SM), 3) angka bertahan 5 (AB5) (khusus SD)/angka bertahan (AB) (khusus SMP dan SM), dan 4) rata-rata lama belajar (RLB).

Berdasarkan pada 29 jenis indikator pendidikan menggunakan misi pendidikan 5K maka dihasilkan kinerja dikdasmen berdasarkan komposit indikator misi pendidikan 5K. Misi K1 ketersediaan layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit delapan indikator. Misi K2 keterjangkauan layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit tiga indikator. Misi K3 kualitas layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit 11 indikator. Misi K4 kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit tiga indikator. Misi K5 kepastian mendapatkan layanan pendidikan tercapai menggunakan komposit empat indikator. Indikator %SB TK pada misi K3 digunakan pada tingkat SD termasuk dalam menghitung kinerja dikdasmen karena SD tidak ada %Lab. Indikator APM pada misi K5 tidak digunakan untuk menghindari duplikasi karena sudah digunakan APK.

Masing-masing misi K1 sampai K5 memiliki nilai antara 1-100. Angka 1 yang terburuk dan 100 yang terbaik. Rata-rata dari masing-masing misi merupakan nilai

ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian, sedangkan rata-rata nilai misi K1 sampai K5 merupakan pencapaian kinerja pendidikan. Oleh karena indikator pendidikan berdasarkan Misi K1 sampai K5 memiliki satuan yang berbeda maka perlu dilakukan konversi menggunakan standar yang terdapat pada Tabel 2.1 sehingga kesemua indikator tersebut bisa dijumlahkan dan dibuat rata-ratanya.

Tabel 2.1
Standar untuk Melakukan Konversi Masing-masing Indikator

Misi	No.	Jenis Indikator	Satuan	SD	SMP	SM Dikdasmen	Penjelasan
Misi K1	1	Rasio S/Sek	Siswa	192	324	432	- SD 6RK, SMP 9RK, SM 12RK
	2	Rasio S/K	Siswa	32	36	36	- Permendikbud 23/2013, 24/2007 (SMA) & 40/2008 (SMK)
	3	Rasio K/RK	Kelas	1	1	1	1 Ideal
	4	% Perpustakaan	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	5	% Ruang UKS	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	6	% R. Komputer	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	7	% Tempat Olahraga	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	8	% Laboratorium	Persentase	-	100	100	100 Ideal
Misi K2	1	TPS	Siswa	53	90	67	- Angka nasional 2012/2013
	2	DT	Siswa	176	360	552	- Angka nasional 2012/2013
	3	SB	Rupiah	828,000	1,014,000	1,428,000	- SD, SMP, & SM 70% dr BOS 2014
Misi K3	1	% SB TK	Persentase	100	-	-	- Ideal
	2	% GL	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	3	R-S/G	Siswa	16	14	12	- Angka nasional 2012/2013
	4	AL	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	5	AU	Persentase	0	0	0	0 Ideal
	6	APS	Persentase	0	0	0	0 Ideal
	7	% RKb	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	8	% Perpus baik	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	9	% RUKS baik	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	10	% RKom baik	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	11	%TOR baik	Persentase	100	100	100	100 Ideal
	12	% Lab baik	Persentase	-	100	100	100 Ideal
Misi K4	1	PG APK	Persentase	0	0	0	0 Ideal
	2	IPG APK	Indeks	1	1	1	1 Ideal
	3	% S-Swt	Persentase	9.53	24.25	47.54	- Angka nasional 2012/2013
Misi K5	1	APK	Persentase	115	100	100	100 Angka nasional 2012/2013 (SD)/ideal
	2	AMM/AM	Persentase	55	100	100	100 Angka nasional 2012/2013 (SD)/ideal
	3	AB5/AB	Persentase	94	100	100	- Angka nasional 2012/2013 (SD)/ideal
	4	RLB	Tahun	6	3	3	- Ideal

Tabel 2.2
Jenis Kinerja Berdasarkan Kategori Wajar Dikdas 9 Tahun

No.	Jenis Kinerja	Nilai
1	Paripurna	95 dan lebih
2	Utama	90.00-94.99
3	Madya	85.00-89.99
4	Pratama	80.00-84.99
5	Kurang	kurang 80.00

Selain itu, untuk mengetahui pencapaian kinerja dikdasmen disajikan jenis kinerja dengan mengambil kategori yang digunakan pada wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (wajar dikdas 9 tahun), yaitu paripurna dengan nilai 95 dan lebih tinggi, utama dengan nilai 90,00 sampai 94,99, madya dengan nilai 85,00-89,99, pratama dengan nilai 80,00-84,99, dan kurang dengan nilai kurang 80,00. Jenis kinerja dimaksud disajikan pada Tabel 2.2.

BAB III

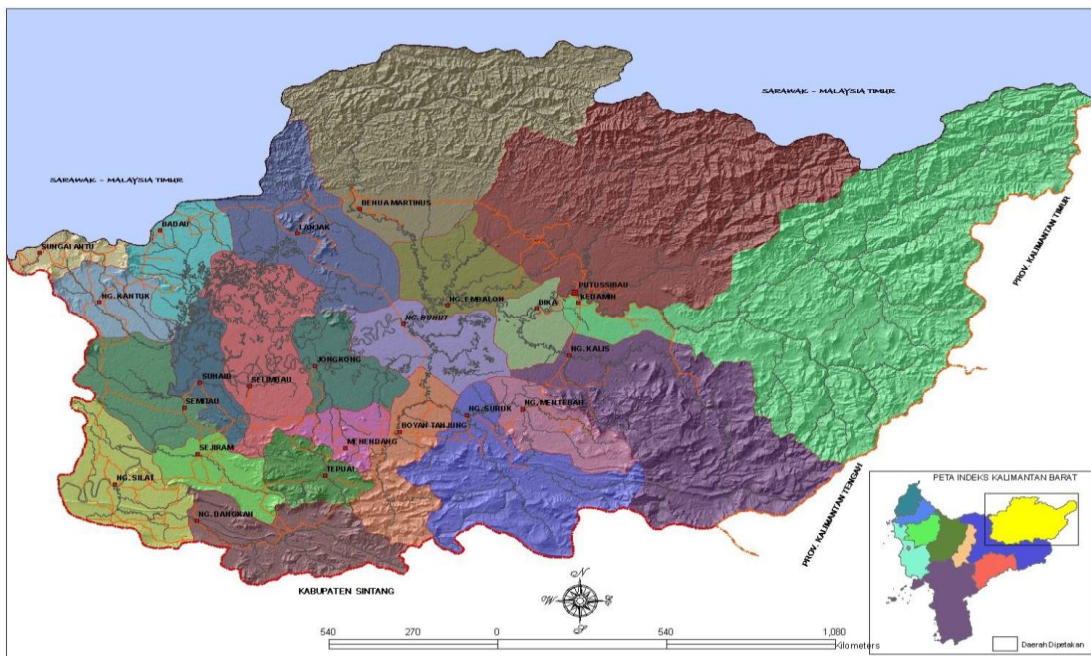
KEADAAN UMUM

Pada Bab III keadaan umum dimulai dengan peta kabupaten Kapuas Hulu yang menggambarkan letak kabupaten Kapuas Hulu dalam kaitannya dengan lingkungan sekelilingnya. Kemudian, dilanjutkan dengan keadaan nonpendidikan yang meliputi enam faktor, yaitu 1) administrasi pemerintahan daerah, 2) demografi, 3) geografi, 4) ekonomi, dan 5) sosial budaya dan agama. Terakhir dijelaskan tentang keadaan pendidikan yang dimulai dari tingkat SD sampai tingkat SM.

A. Peta Kabupaten Kapuas hulu

Berdasarkan Peta 3.1 dapat dikemukakan bahwa batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang. Dengan melihat peta tersebut, diketahui bahwa daerah tersebut dilalui oleh sungai Kapuas.

Peta 3.1
Peta Wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

B. Nonpendidikan

Keadaan nonpendidikan dimasukkan dalam profil pendidikan karena selama ini terdapat kesan bahwa faktor lingkungan sering kurang diperhitungkan dalam perencanaan pendidikan sehingga timbul berbagai masalah, antara lain 1) input pendidikan kurang dikelola secara optimal dan 2) output pendidikan dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lingkungan sehingga belum mampu menunjang pembangunan nasional. Untuk itu, masalah nonpendidikan perlu dikaitkan dengan pendidikan yang ada.

1. Administrasi Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 24, Tahun 2014, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Kapuas Hulu sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi tidaklah berdiri sendiri melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten/kota atau provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 3.1, Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas 23 kecamatan dan yang terbagi ke dalam 282 kelurahan/desa dengan luas wilayah seluruhnya 31.163 Km².

Tabel 3.1
Administrasi Pemerintahan
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Variabel	Jumlah
1	Kabupaten/Kota	1
2	Kecamatan	23
3	Desa/Kelurahan	282
4	Desa terpencil	169
5	Luas Wilayah (km ²)	31.163

Sumber: Sheet TabGrafNP

2. Demografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 2/2003), pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan.

Berdasarkan Tabel 3.2, jumlah penduduk seluruhnya kabupaten Kapuas Hulu sebesar 237.599 orang yang terdiri dari laki-laki sebesar 122.285 orang atau 51,47 persen dan perempuan sebesar 115.314 orang atau 48,53 persen. Penduduk usia 0-6 tahun adalah penduduk usia PAUD sebesar 23.918 orang. Penduduk usia 4-5 tahun adalah penduduk usia masuk TK sebesar 8.478 orang. Penduduk usia 4-6 tahun adalah penduduk usia TK sebesar 12.467 orang. Penduduk usia 6-7 tahun adalah penduduk usia masuk SD sebesar 8.519 orang. Penduduk usia 7-12 tahun adalah penduduk usia SD sebesar 28.054 orang, yang terdiri laki-laki sebesar 14.408 orang atau 51,36 persen dan perempuan sebesar 13.646 orang atau 48,64 persen. Penduduk usia 13-15 tahun adalah penduduk usia SMP sebesar 15.157 orang yang terdiri laki-laki sebesar 7.808 orang atau 51,51 persen dan perempuan sebesar 7.349 orang atau 48,49 persen. Penduduk usia 16-18 tahun adalah penduduk usia SM sebesar 12.605 orang yang terdiri laki-laki sebesar 6.371 orang atau 50,54 persen dan perempuan sebesar 6.234 atau 49,46 persen. Penduduk usia 15-24 tahun adalah penduduk usia buta aksara muda sebesar 41.612 orang, sedangkan usia 15-59 tahun adalah penduduk usia buta aksara dewasa sebesar 160.524 orang.

Tabel 3.2
Keadaan Penduduk menurut Kelompok Usia
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1	Penduduk seluruh	122.285	51,47	115.314	48,53	237.599
2	Penduduk 0-6 tahun	12.504	52,28	11.414	47,72	23.918
3	Penduduk 4-5 tahun	4.449	52,48	4.029	47,52	8.478
4	Penduduk 4-6 tahun	6.490	52,06	5.977	47,94	12.467
5	Penduduk 6-7 tahun	4.310	50,59	4.209	49,41	8.519
6	Penduduk 7-12 tahun	14.408	51,36	13.646	48,64	28.054
7	Penduduk 13-15 tahun	7.808	51,51	7.349	48,49	15.157
8	Penduduk 16-18 tahun	6.371	50,54	6.234	49,46	12.605
9	Penduduk 15-24 tahun	20.876	50,17	20.736	49,83	41.612
10	Penduduk 15-59 tahun	82.475	51,38	78.049	48,62	160.524

Sumber: Sheet TabGrafNP

Menurut catatan terakhir, pada tahun 2017 kepadatan penduduk adalah 8 per km² dengan kecamatan Putussibau Selatan sebagai kecamatan terpadat sebesar 6.352 per km² dan kecamatan Puring Kencana sebagai kecamatan terjarang sebesar 295 per km² (Tabel 1 dan Tabel 65 Lampiran).

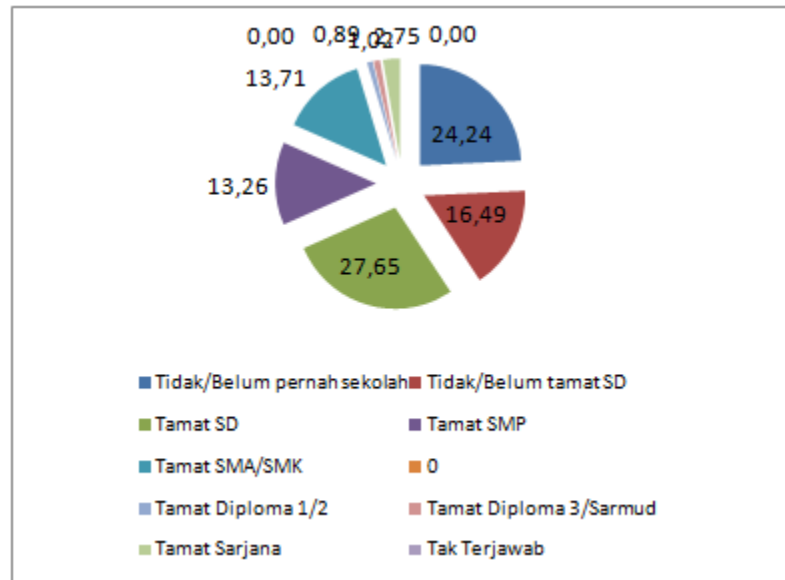
Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan Penduduk
Kabupaten Kapuas Hulu.
Tahun 2017

No.	Variabel	Jumlah	%
1	Tidak/Belum pernah sekolah	57.825	24,24
2	Tidak/Belum tamat SD	39.338	16,49
3	Tamat SD	65.962	27,65
4	Tamat SMP	31.635	13,26
5	Tamat SMA/SMK	32.714	13,71
6	Tamat Diploma 1/2	2.133	0,89
7	Tamat Diploma 3/Sarmud	2.429	1,02
8	Tamat Sarjana	6.563	2,75
9	Tak Terjawab	0	0,00
	Jumlah	238.599	100,00

Sumber: Sheet TabGrafNP

Berdasarkan Tabel 3.3, tingkat pendidikan penduduk yang dirinci menjadi 9 kategori dapat digambarkan sebagai berikut 1) tidak/belum pernah sekolah sebanyak 57.825 orang atau 24,24 persen, 2) tidak/belum tamat SD sebanyak 39.338 orang atau 16,49 persen, 3) tamat SD sebanyak 65.962 orang atau 27,65 persen, 4) tamat SMP sebanyak 31.635 orang atau 13,26 persen, 5) tamat SMA/SMK sebanyak 32.714 orang atau 13,71 persen, 6) tamat Diploma I dan II sebanyak 2.133 orang atau 0,89 persen, 7) tamat Diploma III/Sarmud sebanyak 2.429 orang atau 1,02 persen), 8) tamat Sarjana 6.563 orang atau 2,75 persen. Dengan demikian, pendidikan terbesar penduduk adalah tamat SD dan terkecil adalah tamat Diploma III/Sarmud. Ketika wajar dikdas dianggap sudah berhasil maka sebagian besar penduduk harusnya berijazah SMP, pada kenyataannya penduduk yang tamat SMP belum yang terbesar.

Grafik 3.1
Tingkat Pendidikan Penduduk
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafNP

Berdasarkan Tabel 3.4, penduduk yang dapat membaca menulis sebesar 161.887 atau 94,86 persen, sedangkan yang buta huruf sebesar 8.768 atau 5,14 persen. Jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja pada tahun 2017 sebesar 174.717. Jumlah angkatan kerja sebesar 129.667. Jumlah bukan angkatan kerja sebesar 45.050 orang atau 25,78 persen terdiri atas 1) jumlah penduduk bersekolah sebesar 15.789 orang atau 9,04 persen), 2) jumlah penduduk mengurus rumah tangga sebesar 21.232 orang atau 12,15 persen; dan 3) lain-lain sebesar 8.029 orang atau 4,60 persen.

Tabel 3.4
Tingkat Kepandaian Membaca/Menulis dan Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Variabel	Jumlah	%
Tingkat Kepandaian Membaca/Menulis		170.655	100,00
1	Dapat membaca/menulis	161.887	94,86
2	Buta Huruf	8.768	5,14
Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja		174.717	100,00
Angkatan Kerja		129.667	74,22
1	Bekerja	125.779	71,99
2	Mencari Pekerjaan	3.888	2,23
Bukan Angkatan Kerja		45.050	25,78
1	Bersekolah	15.789	9,04
2	Mengurus Rumah Tangga	21.232	12,15
3	Lainnya	8.029	4,60

Sumber: Sheet TabGrafNP

3. Geografi

Faktor geografi dimaksud mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula bersifat menghambat. Tersedianya SDA merupakan faktor yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan karena keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padat merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar.

Keadaan topografi di wilayah kabupaten/kota atau provinsi perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan enam faktor, yaitu 1) rencana penentuan lokasi sekolah; 2) rencana rayonisasi penerimaan siswa baru; 3) rencana supervisi sekolah dan pengendalian; 4) rencana penempatan guru; 5) rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku; dan 6) peralatan pendidikan lainnya.

SDA baik yang terkandung di daratan, di sungai, maupun di laut (jika ada) merupakan potensi ekonomi yang besar. Hal itu berarti bahwa pendidikan SDA secara efisien akan meningkatkan pendapatan pemerintah kabupaten/kota atau provinsi dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan sehingga pengembangan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Berdasarkan Tabel 3.5, Keadaan alam di Kabupaten Kapuas Hulu dengan curah hujan rata-rata adalah 3300-5000 mm² dan hari hujan sebesar 240-260. Faktor iklim yang mencakup antara lain aspek lamanya musim kemarau dan musim penghujan serta banyaknya curah hujan juga akan berpengaruh terhadap lingkungan seperti terhadap tingkat kesuburan lahan, kekeringan, banjir dan sebagainya, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung, faktor iklim juga akan mempengaruhi pendidikan.

Tabel 3.5
Keadaan Geografi
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Variabel	Jumlah
1	Sumber daya alam yang menonjol	6
2	Keadaan Alam	
	a. Curah Hujan (mm)	3300-5000
	b. Hari hujan (hari)	240-260

Sumber: Sheet TabGrafNP

4. Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang (harmonis).

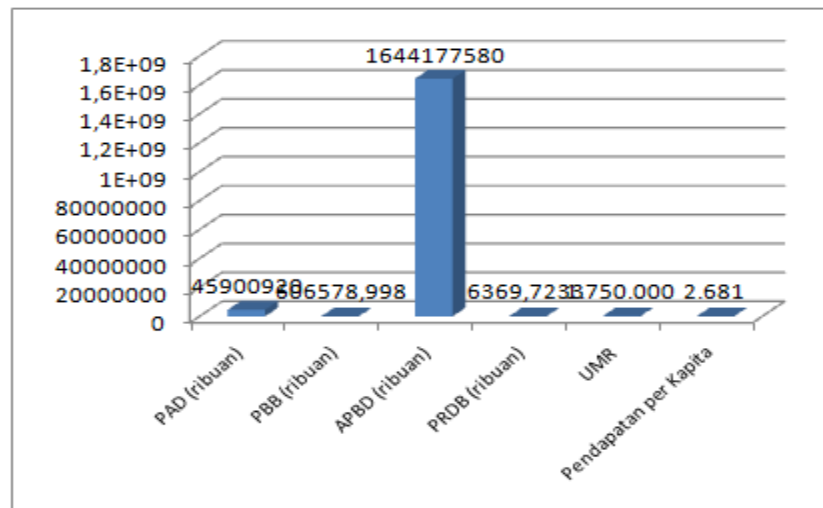
Tabel 3.6
Keadaan Ekonomi
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Variabel	Jumlah
1	PAD	45.900.920.000
2	PBB	606.578.998
3	APBD	1.644.177.580.000
4	PDRB	6.369.723
5	UMR	1.750.000
6	Pendapatan per Kapita	2.681

Sumber: Sheet TabGrafNP

Berdasarkan Tabel 3.6, tingkat pendapatan suatu daerah dapat diukur antara lain dari pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum regional (UMR), dan pendapatan per kapita. PAD tahun 2017, kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar Rp 45.900.920.000, penerimaan dari PBB sebesar Rp 606.578.998, APBD sebesar Rp 1.644.177.580.000, PDRB sebesar Rp 6.369.723, UMR yang berlaku sebesar Rp 1.750.000, dan rata-rata pendapatan per kapita sebesar Rp 2.681.

Grafik 3.2
Keadaan Ekonomi
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafNP

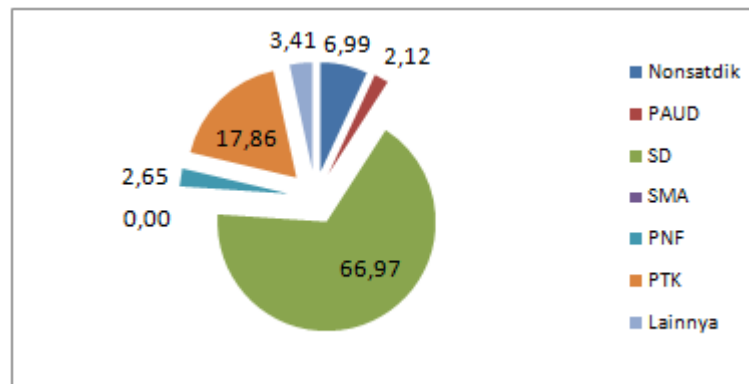
Tabel 3.7
Biaya Langsung Program Pendidikan dari SKPD
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Variabel	Jumlah	%
1	Program Nonsatdik	4.647.520.500	6,99
2	Program PAUD	1.409.690.500	2,12
3	Program SD dan SMP	44.518.396.865	66,97
4	Program SMA dan SMK	0	0,00
5	Program PNF	1.759.624.000	2,65
6	Program Mutu PTK	11.870.837.000	17,86
7	Program Lainnya	2.265.135.000	3,41
	Jumlah	66.471.203.865	100,00

Sumber: Sheet TabGrafNP

Berdasarkan Tabel 3.7, biaya langsung untuk program pendidikan yang berasal dari DPA SKPD terdiri dari program nonsatuan pendidikan (administrasi), PAUD, wajar dikdas yang terdiri dari SD dan SMP, pendidikan menengah yang terdiri dari SMA dan SMK, PNF, peningkatan mutu PTK, program lainnya. Program lainnya terdiri dari PKLK, program kepemudaan dan olahraga, program kebudayaan, dan program pendidikan tinggi dan lainnya. Biaya langsung untuk semua jenjang untuk Kabupaten Kapuas Hulu Rp 66.471.203.865. Dari anggaran tersebut, anggaran terbesar adalah pada jenjang SD dan SMP sebesar Rp 44.518.396.865 atau 66,97 persen dan terkecil adalah pada jenjang PAUD sebesar Rp 1.409.690.500 atau 2,12 persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk bidang pendidikan oleh pemerintah prioritas diberikan pada jenjang pendidikan SD dan SMP dalam rangka pendidikan wajib sembilan tahun, sedangkan biaya untuk lainnya sebesar Rp2.265.135.000 atau 3.41%.

Grafik 3.3
Biaya Langsung Pendidikan Berdasarkan SKPD
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafNP

Tabel 3.8
Mata Pencanharian Penduduk
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

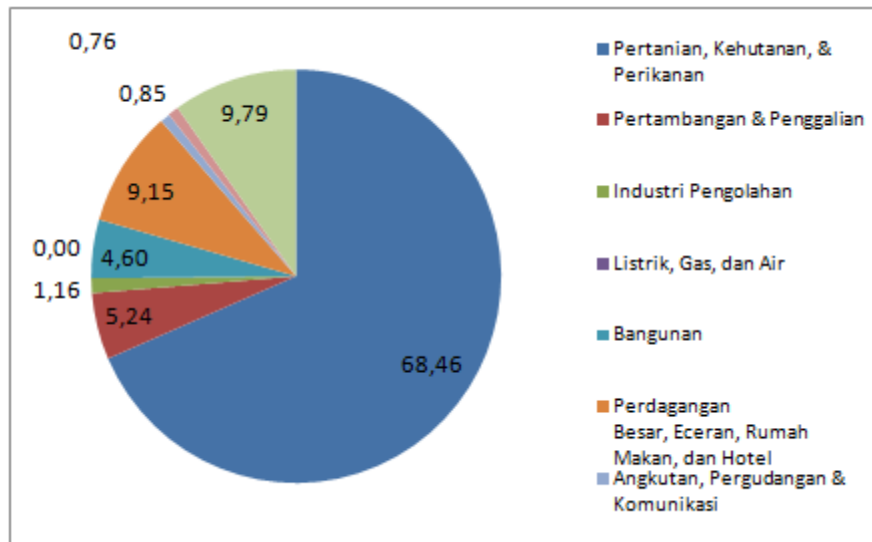
No.	Variabel	Jumlah	%
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	86.108	68,46
2	Pertambangan & Penggalian	6.585	5,24
3	Industri Pengolahan	1.453	1,16
4	Listrik, Gas, dan Air	-	0,00
5	Bangunan	5.783	4,60
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	11.503	9,15
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	961	0,76
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Bangunan, Dan Tanah	1.069	0,85
9	Jasa Kemasyarakatan	12.317	9,79
	Jumlah	125.779	100,00

Sumber: Sheet TabGrafNP

Berdasarkan Tabel 3.8, mata pencaharian penduduk adalah di sektor pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan sebesar 86.108 orang atau 68,46 persen; di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6.585 orang 5,24 persen; di sektor industri pengolahan sebesar 1.453 orang atau 1,16 persen, di sektor listrik, gas dan air sebesar 0 orang atau 0 persen; di sektor bangunan sebesar 5.783 orang atau 4,60 persen, di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel 11.503 orang atau 9,15 persen; di sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi 961 orang atau 0,76 persen; di sektor keuangan, asuransi, usaha bangunan, dan tanah 1.069 orang atau 0,85 persen, dan di

sektor jasa kemasyarakatan 12.317 orang atau 9,79 persen. Dengan demikian, mayoritas masyarakat berada pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan terkecil pada sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi.

Grafik 3.4
Mata Pencarian Penduduk
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafNP

5. Sosial Budaya dan Agama

Kebudayaan Daerah Kapuas Hulu terdiri dari dua etnis besar yaitu Dayak dan Melayu yang memiliki tradisi seni dan budaya serta peninggalan sejarah purbakala yang mempunyai daya tarik tersendiri sebagai salah satu obyek wisata dan juga sebagai unsur penunjang terciptanya Sapta Pesona Industri Pariwisata. Keunikan seni budaya masyarakat Dayak dan Melayu yang tumbuh dan berkembang secara tradisional yang mempunyai karakteristik tersendiri yang masih bersifat alami, namun di sisi lain adanya beberapa nilai tertentu yang mengalami kondisi krisis akibat pengaruh arus globalisasi dan budaya asing tetapi tidak mengurangi dari norma-norma adat istiadat budaya kedua etnis tersebut.

Berdasarkan Tabel 3.9, gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam sebesar 143.033 orang atau 100 persen, Protestan sebesar 19.627 orang atau 13,72 persen, Katolik sebesar 74,360 orang atau 51,99 persen, Hindu sebesar 31 orang atau 0,02 persen, Budha sebesar 275 orang atau 0,19 persen, dan Khonghucu sebesar 265 orang atau 0,19 persen. Dengan demikian, mayoritas masyarakat beragama islam dan terkecil pada agama Hindu.

Masih pada Tabel 3.9, keadaan kesehatan masyarakat dapat digambarkan bahwa gizi masyarakat pada umumnya bervariasi, yaitu ada yang baik, kurang atau buruk, yang

didukung oleh rumah sakit sebanyak 2 buah, puskesmas sebanyak 23 buah, dan puskesmas pembantu 90 buah.

Tabel 3.9
Keadaan Keagamaan dan Kesehatan
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Agama	Jumlah	%
Keagamaan			
1	Islam	143.033	100,00
2	Protestan	19.627	13,72
3	Katholik	74.360	51,99
4	Hindu	31	0,02
5	Budha	275	0,19
6	Khonghucu	265	0,19
	Jumlah	237.591	
Kesehatan			
1	Rumah Sakit	2	
2	Puskesmas	23	
3	Puskesmas Pembantu	90	

Sumber: Sheet TabGrafNP

B. Pendidikan

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah-daerah tersebut. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SM, dan PAUD dan Nonformal.

1. Jenjang SD/MI

Berdasarkan Tabel 3.10 pada tahun 2016/2017 di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 10 jenis data prasarana SD/MI. Jumlah SD/MI sebesar 424, dengan rincian negeri sebesar 396 dan swasta sebesar 28, sehingga terlihat sekolah negeri lebih banyak. Besarnya sekolah negeri karena banyaknya SD/MI Negeri yang dibangun melalui program Inpres SD sejak tahun 1973/1974 sampai 1983/1984. Jumlah SD/MI dengan akreditasi B sebesar 123, akreditasi C sebesar 162, dan yang belum terakreditasi sebesar 135.

Jumlah kelas SD/MI sebesar 2.582 sedangkan ruang kelas SD/MI sebesar 2.407, dengan rincian 578 ruang dengan kondisi baik, 1.616 ruang dengan kondisi rusak ringan, dan dengan kondisi rusak berat 123 ruang. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar

di SD/MI terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 117, dalam kondisi baik sebesar 88, ruang usaha kesehatan sekolah sebesar 10 dengan kondisi rusak sebesar 2, ruang komputer sebesar 2 dengan kondisi rusak. Toilet sebesar 452, air bersih sebesar 106 dan listrik sebesar 96.

Tabel 3.10
Data Prasarana SD
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

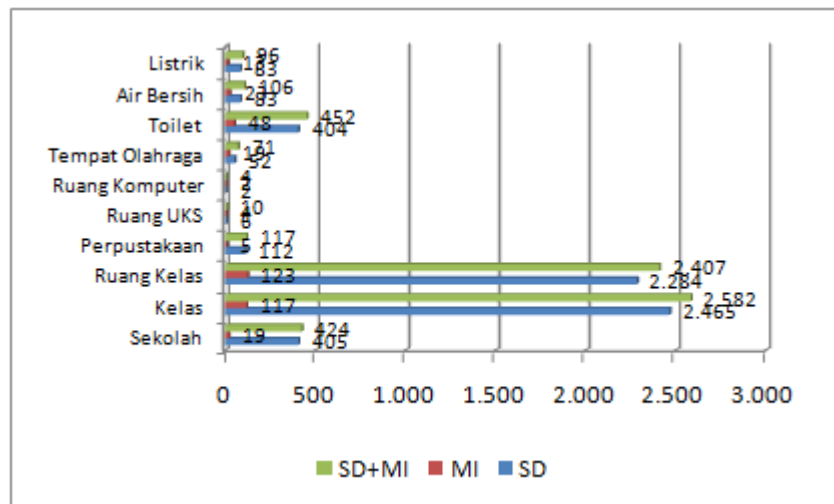
No.	Variabel	SD	MI	SD+MI
1	Sekolah Menurut Status	405	19	424
	a. Negeri	395	1	396
	b. Swasta	10	18	28
	Sekolah Menurut Akreditasi	405	18	423
	a. Akreditasi A	2	1	3
	b. Akreditasi B	117	6	123
	c. Akreditasi C	154	8	162
	d. Belum Akreditasi	132	3	135
2	Kelas/rombongan belajar	2.465	117	2.582
3	Ruang Kelas menurut Kondisi	2.284	123	2.407
	a. Baik	519	59	578
	b. Rusak Ringan	1.566	50	1.616
	c. Rusak Berat	199	14	213
	RK Bukan Milik	0	0	0
4	Perpustakaan	112	5	117
	a. Baik	87	1	88
	b. Rusak	25	4	29
5	Ruang Usaha Kesehatan Sekolah	6	4	10
	a. Baik	6	2	8
	b. Rusak	0	2	2
6	Ruang Komputer	2	2	4
	a. Baik	2	0	2
	b. Rusak	0	2	2
7	Tempat Olahraga	52	19	71
	a. Baik	42	8	50
	b. Rusak	10	11	21
8	Toilet	404	48	452
9	Air Bersih	83	23	106
10	Listrik	83	13	96

Sumber: Sheet TabGrafSD

Bila setiap ruang kelas pada jenjang SD/MI digunakan untuk kegiatan belajar mengajar hanya sekali maka terdapat kekurangan atau kelebihan ruang kelas jenjang SD/MI. Demikian juga untuk perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, toilet, air bersih, dan listrik bila setiap sekolah pada jenjang SD/MI harus memiliki prasarana tersebut maka terdapat kekurangan atau kelebihan prasarana sekolah jenjang SD/MI.

Berdasarkan Tabel 3.11 disajikan kekurangan atau kelebihan prasarana sekolah untuk Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah ruang kelas SD kekurangan sebesar 181 ruang kelas yang kekurangan hendaknya dapat dipenuhi dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan pada jenjang SD. Sebaliknya, bagi ruang kelas jenjang SD yang kelebihan hendaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan anak usia sekolah untuk masuk ke SD sehingga ketersediaan layanan pendidikan jenjang SD dapat dimanfaatkan oleh semua anak di kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, ketersediaan layanan pendidikan dapat meningkatkan partisipasi siswa bersekolah di SD.

Grafik 3.5
Prasarana Sekolah SD/MI
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSD

Tabel 3.11
Kekurangan atau Kelebihan Prasarana SD
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

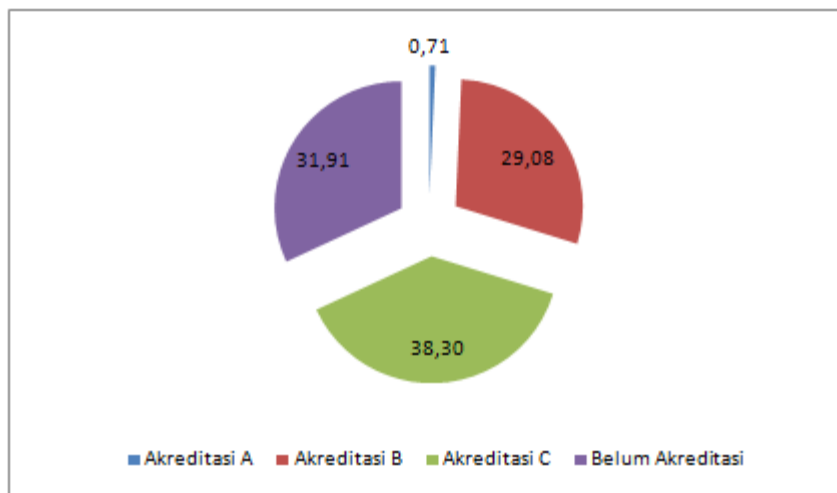
No.	Jenis Prasarana	SD
1	Ruang Kelas	-181
2	Perpustakaan	-293
3	Ruang UKS	-399
4	Ruang Komputer	-403
5	Tempat Olahraga	-353
6	Toilet	-1
7	Air Bersih	-322
8	Listrik	-322

Sumber: Sheet TabGrafSD

Akreditasi sekolah menunjukkan mutu sekolah. Jumlah SD yang telah terakreditasi terdapat pada Tabel 3.11 dan Grafik 3.6 maka SD/MI yang telah terakreditasi A, B, dan C sebesar 288, sedangkan yang belum terakreditasi sebesar 135 ternyata lebih kecil daripada yang telah diakreditasi.

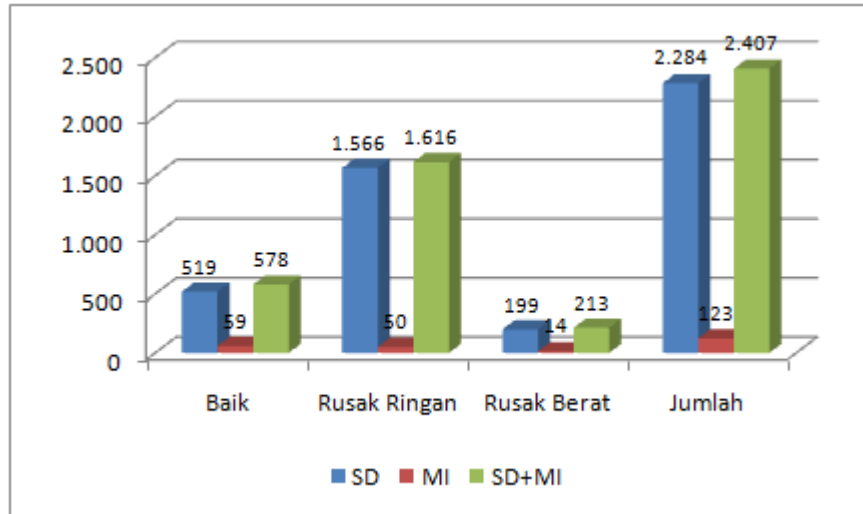
Ruang kelas sebagai prasarana penting sekolah terbagi dalam tiga kondisi, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Jumlah ruang kelas menurut kondisi terdapat pada Tabel 3.11 dan Grafik 3.7. Berdasarkan ruang kelas di kabupaten Kapuas Hulu, ternyata SD/MI memiliki 1.616 ruang kelas yang rusak ringan. Jumlah ruang kelas yang baik di SD/MI sebesar 578 ruang dan ruang kelas rusak berat SD/MI sebesar 213 kondisi ini memerlukan perbaikan ruang kelas.

Grafik 3.6
Akreditasi Sekolah SD/MI
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSD

Grafik 3.7
Ruang Kelas Milik menurut Kondisi SD/MI
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSD

Berdasarkan Tabel 3.12, terdapat 5 jenis data Sumber Daya Manusia SD/MI. Jumlah siswa SD/MI seluruhnya sebesar 33.497, dengan rincian negeri sebesar 30.497 dan swasta sebesar 3.001. Siswa tingkat VI SD/MI tahun lalu sebesar 5.481 sedangkan siswa SD/MI seluruhnya tahun lalu sebesar 34.084. Jumlah mengulang SD/MI sebesar 1.647 putus sekolah SD/MI sebesar 17 dan lulusan SD/MI sebesar 5.113 orang.

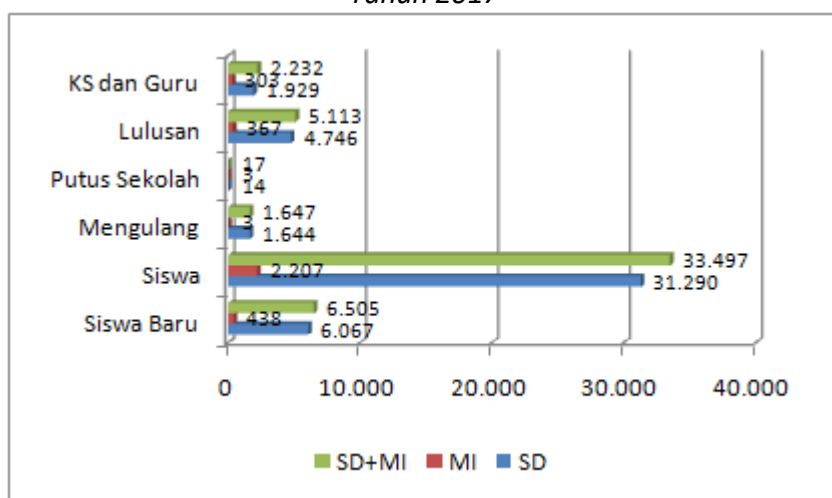
Tabel 3.12
Data Sumber Daya Manusia SD/MI
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Variabel	SD	MI	SD+MI
1	Siswa Baru menurut Usia	6.067	438	6.505
	a. Usia 6-7 th	3.297	355	3.652
	b. Usia lainnya	2.770	83	2.853
	Siswa Baru menurut Asal	6.067	6.343	12.410
	a. TK/RA/BA	0	276	276
	b. Rumah Tangga	6.067	6.067	12.134
2	Siswa Menurut Status	31.290	2.207	33.497
	a. Negeri	30.206	290	30.496
	b. Swasta	1.084	1.917	3.001
	Siswa Menurut Usia Sekolah	31.290	2.207	33.497
	a. <7 th	3.475	273	3.748
	b. 7-12 th	25.371	1.862	27.233
	c. >12 th	2.444	72	2.516
	Siswa Laki2 menurut Usia	16.554	1.141	17.695
	a. <7 th	1.795	127	1.922
	b. 7-12 th	13.288	974	14.262
	c. >12 th	1.471	40	1.511
	Siswa Perempuan menurut Usia	14.736	14.736	29.472
	a. <7 th	1.680	1.680	3.360
	b. 7-12 th	12.083	12.083	24.166
	c. >12 th	973	973	1.946
	Siswa tk VI tahun lalu	5.145	336	5.481
	Siswa seluruh tahun lalu	32.287	1.797	34.084
3	Mengulang	1.644	3	1.647
4	Putus Sekolah	14	3	17
5	Lulusan	4.746	367	5.113
6	KS dan Guru menurut Ijazah	1.929	303	2.232
	a. <S1/D4	398	196	594
	b. S1/D4 & lebih tinggi	1.531	107	1.638
	KS dan Guru menurut Status Kepeg	2.621	198	2.819
	a. PNS	1.929	88	2.017
	b. Non-PNS	692	110	802
	Kepala Sekolah	388	16	404
	a. Bersertifikat	269	12	281
	b. Belum bersertifikat	119	4	123
	Guru	1.541	173	1.714
	a. Bersertifikat	1.017	64	1.081
	b. Belum bersertifikat	524	109	633

Sumber: Sheet TabGrafSD

Kepala sekolah dan guru yang mengajar di SD/MI sebanyak 2.232 di antaranya yaitu berijazah di bawah S1 594 dan yang berijazah S1/D4 sebesar 1.638. Kepala sekolah SD yang memiliki sertifikat sebesar 281 dan belum bersertifikat sebesar 123. Demikian juga guru SD yang memiliki sertifikat sebesar 1.081 dan belum memiliki sertifikat sebesar 633.

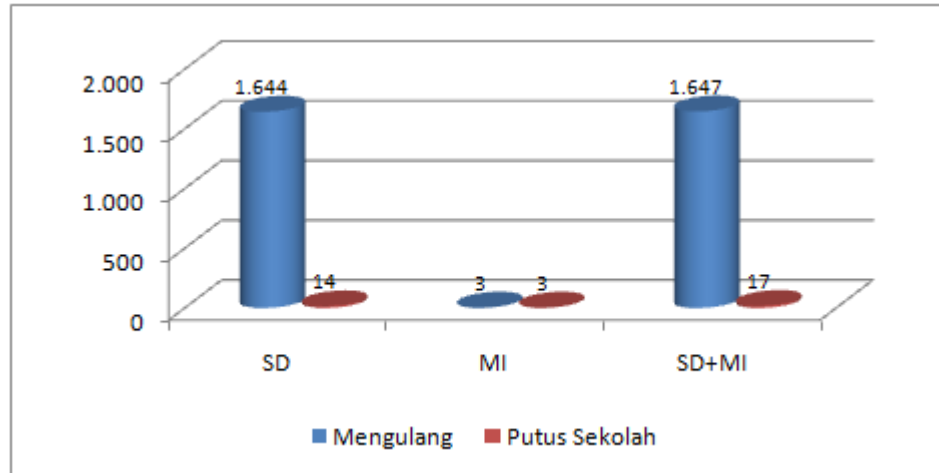
Grafik 3.8
Sumber Daya Manusia SD/MI
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSD

Siswa usia sekolah jenjang SD/MI sangat penting diketahui dalam menghitung angka partisipasi murni (APM). Bila dibandingkan antara mengulang dan putus sekolah yang terdapat pada Tabel 3.12 dan Grafik 3.10 ternyata di Kabupaten Kapuas Hulu mengulang pada SD/MI sebesar 1.647 orang dan Putus sekolah pada SD/MI sebesar 17 orang. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka mengulang yang besar pada SD/MI harus segera ditanggulangi melalui program remedial. Hal yang sama untuk putus sekolah yang besar pada SD/MI hendaknya ditanggulangi melalui program retrieval sehingga anak yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah atau dapat masuk di program Paket A dalam rangka peningkatan mutu di SD/MI.

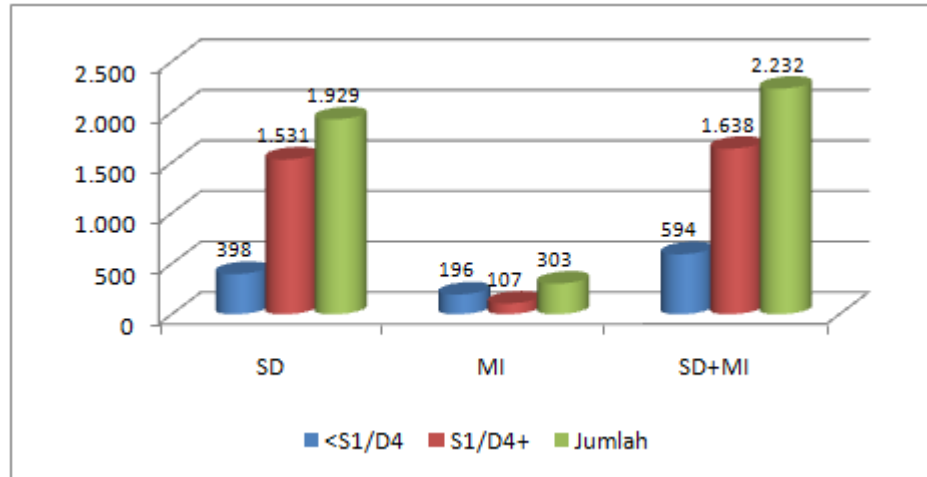
Grafik 3.10
Mengulang dan Putus Sekolah SD
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSD

Kelayakan mengajar guru menggunakan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No.14/2005). Guru layak mengajar di tingkat SD adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi. Jumlah guru menurut kelayakan mengajar dapat dilihat pada Tabel 3.12 dan Grafik 3.11. Jumlah guru layak mengajar yang terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat di SD/MI sebesar 1.638 orang. Kecilnya guru layak di jenjang SD/MI karena adanya peningkatan kualifikasi bahwa guru SD yang layak sebelumnya adalah mereka yang memiliki ijazah Diploma II. Sebaliknya, guru yang tidak layak mengajar di SD sebesar 594. Kondisi ini cukup memprihatinkan, untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut dalam rangka penyetaraan guru agar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada UU No. 14/2005.

Grafik 3.11
Kepala Sekolah dan Guru menurut Ijazah Tertinggi SD
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSD

2. Jenjang SMP/MI

Berdasarkan Tabel 3.13 terdapat 11 jenis data prasarana SMP/MI pada tahun 2016/2017. Jumlah SMP/MI sebesar 111. Dengan rincian negeri sebanyak 93 dan swasta sebanyak 18 sehingga terlihat sekolah negeri lebih banyak. Dilihat dari akreditasi sekolah sebesar 2 telah terakreditasi A, sebesar 46 telah terakreditasi B, 30 telah terakreditasi C, sedangkan yang belum terakreditasi sebesar 33. Jumlah kelas SMP/MI sebesar 533, Jumlah ruang kelas SMP/MI sebesar 575, dengan rincian 151 ruang dalam kondisi baik, 401 ruang dalam kondisi rusak ringan, dan 23 ruang dalam kondisi rusak berat. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP/MI terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 82, dalam kondisi baik sebesar 22 dan kondisi rusak sebesar 60 ruang. Ruang UKS SMP/MI sebesar 23 dalam kondisi baik sebesar 10 dan kondisi rusak sebesar 13 ruang. Ruang komputer SMP/MI sebesar 14 dalam kondisi baik sebesar 3 ruang dan kondisi rusak sebesar 11. Laboratorium IPA SMP/MI sebesar 47, dalam kondisi baik sebesar 10 dan dalam kondisi rusak sebesar 37. Laboratorium Multimedia sebesar 5, dalam kondisi baik sebesar 3 dan dalam kondisi rusak sebesar 2. Toilet sebesar 180, air bersih sebesar 47, dan listrik sebesar 41.

Tabel 3.13
Data Prasarana SMP
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Variabel	SMP	MTs	SMP+MTs
1	Sekolah Menurut Status	94	17	111
	a. Negeri	90	3	93
	b. Swasta	4	14	18
	Sekolah Menurut Akreditasi	94	17	111
	a. Akreditasi A	1	1	2
	b. Akreditasi B	41	5	46
	c. Akreditasi C	23	7	30
	d. Belum Akreditasi	29	4	33
2	Kelas/rombongan belajar	486	47	533
3	Ruang Kelas menurut Kondisi	509	66	575
	a. Baik	102	49	151
	b. Rusak Ringan	387	14	401
	c. Rusak Berat	20	3	23
	RK Bukan Milik	0	7	7
4	Perpustakaan	72	10	82
	a. Baik	18	4	22
	b. Rusak	54	6	60
5	Ruang Usaha Kesehatan Sekolah	16	7	23
	a. Baik	6	4	10
	b. Rusak	10	3	13
6	Ruang Komputer	10	4	14
	a. Baik	1	2	3
	b. Rusak	9	2	11
7	Tempat Olahraga	94	25	119
	a. Baik	94	12	106
	b. Rusak	0	13	13
8	Laboratorium IPA	44	3	47
	a. Baik	8	2	10
	b. Rusak	36	1	37
	Laboratorium Multimedia	2	3	5
	a. Baik	1	2	3
	b. Rusak	1	1	2
	Laboratorium seluruh	46	6	52
	a. Baik	9	4	13
	b. Rusak	37	2	39
9	Toilet	126	54	180
10	Air Bersih	30	17	47
11	Listrik	28	13	41

Bila satu ruang kelas jenjang SMP/MI diharapkan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar hanya sekali maka terdapat kekurangan atau kelebihan ruang kelas jenjang SMP/MI. Demikian juga untuk perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, toilet, air bersih, dan listrik bila setiap sekolah jenjang SMP/MI harus memiliki prasarana tersebut maka terdapat kekurangan atau kelebihan prasarana sekolah di jenjang SMP/MI.

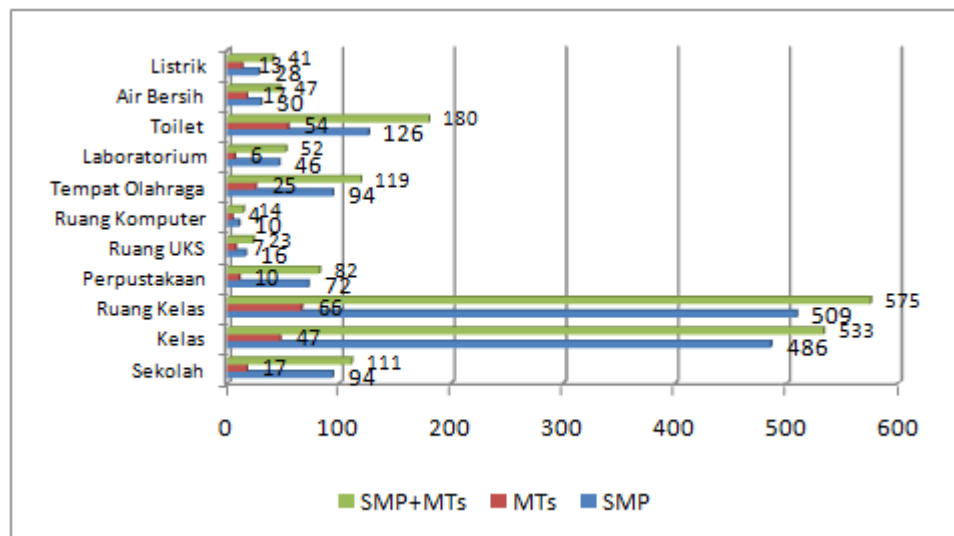
Berdasarkan Tabel 3.14 disajikan kekurangan atau kelebihan prasarana sekolah SMP dan MTs Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah ruang kelas SMP kelebihan sebesar 23. Ruang kelas jenjang SMP yang kekurangan hendaknya dapat dipenuhi dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan SMP. Sebaliknya, bagi ruang kelas yang kelebihan hendaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan anak usia sekolah untuk masuk ke SMP sehingga ketersediaan layanan pendidikan dapat dimanfaatkan oleh semua siswa di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, ketersediaan layanan dapat meningkatkan partisipasi siswa bersekolah di SMP.

Tabel 3.14
Kekurangan atau Kelebihan Prasarana SMP
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Prasarana	SMP
1	Ruang Kelas	23
2	Perpustakaan	-22
3	Ruang UKS	-78
4	Ruang Komputer	-84
5	Tempat Olahraga	0
6	Laboratorium	-48
7	Toilet	32
8	Air Bersih	-64
9	Listrik	-66

Sumber: Sheet TabGrafSMP

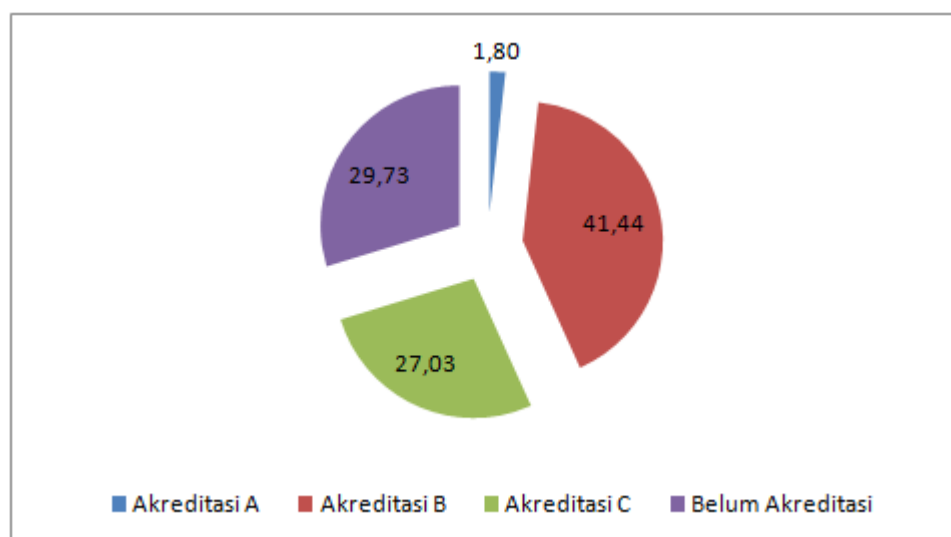
Grafik 3.12
Prasarana Sekolah SMP/MTs
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSMP

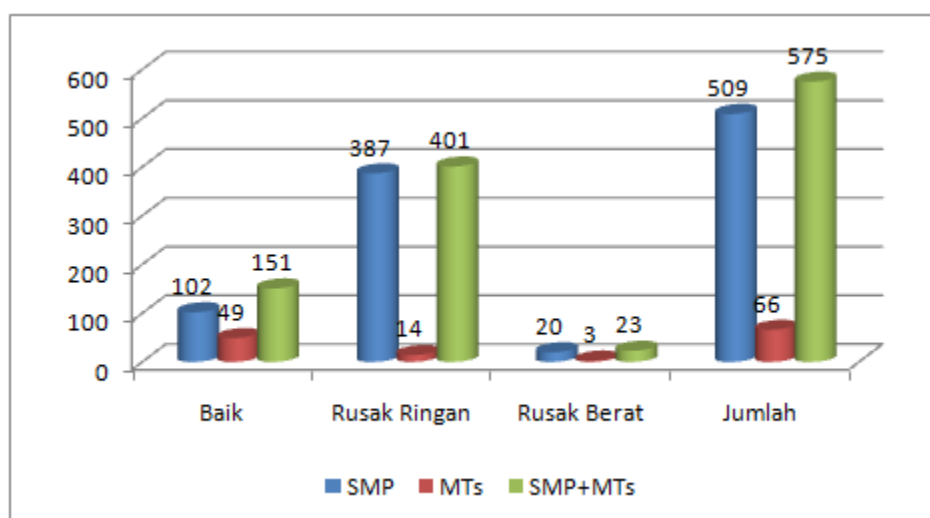
Akreditasi menunjukkan mutu sekolah. Jumlah jenjang SMP yang telah terakreditasi terdapat pada Tabel 3.13 dan Grafik 3.14. Jenjang yang telah terakreditasi A, B, dan C sebesar 94 Sekolah.

Grafik 3.13
Akreditasi SMP
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSMP

*Grafik 3.14
Ruang Kelas Milik SMP/MTs menurut Kondisi
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017*



Sumber: Sheet TabGrafSMP

Ruang kelas sebagai prasarana penting sekolah terbagi dalam tiga kondisi, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Jumlah ruang kelas menurut kondisi terdapat pada Tabel 3.13 dan Grafik 3.14. Berdasarkan ruang kelas di kabupaten Kapuas Hulu SMP/MTs 23 memiliki ruang kelas yang rusak berat. Jumlah ruang kelas yang baik di SMP/MTs sebesar 151 ruang, sedangkan jumlah ruang kelas yang rusak ringan di SMP/MTs sebesar 401 ruang, kondisi ini memerlukan perbaikan ruang kelas.

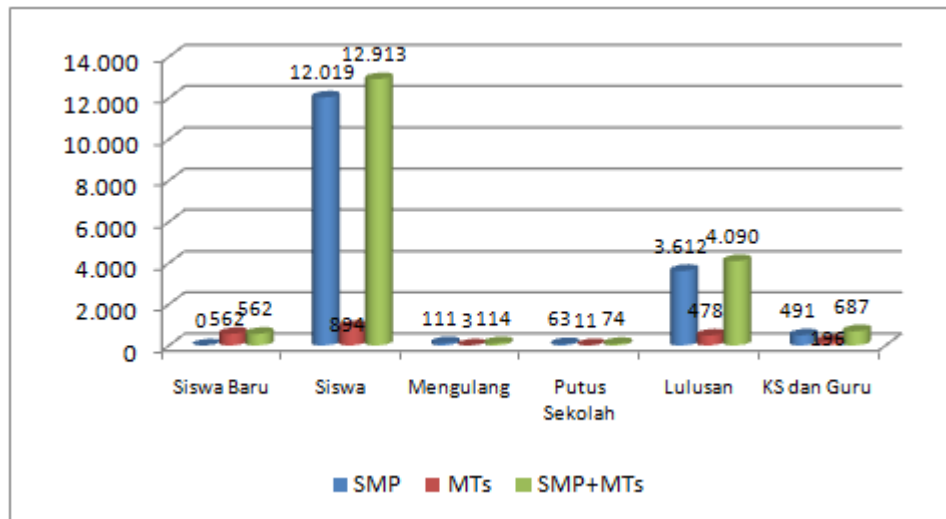
Tabel 3.15
Data Sumber Daya Manusia SMP/MTs
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Variabel	SMP	MTs	SMP+MTs
1	Siswa Baru menurut Jenis Kelamin	0	562	562
	a. Laki-laki	0	287	287
	b. Perempuan	0	275	275
	Siswa Baru menurut Asal	0	562	562
	a. SD	0	373	373
	b. MI	0	189	189
	c. Paket A	0	0	0
2	Siswa Menurut Status	12.019	894	12.913
	a. Negeri	11.584	730	12.314
	b. Swasta	435	164	599
	Siswa Menurut Usia Sekolah	13.244	1.032	14.276
	a. <13 th	1.947	166	2.113
	b. 13-15 th	8.354	647	9.001
	c. >15 th	2.943	219	3.162
	Siswa Laki2 menurut Usia	6.016	462	6.478
	a. <13 th	873	84	957
	b. 13-15 th	4.147	325	4.472
	c. >15 th	996	53	1.049
	Siswa Perempuan menurut Usia	7.228	570	7.798
	a. <13 th	1.074	82	1.156
	b. 13-15 th	4.207	322	4.529
	c. >15 th	1.947	166	2.113
	Siswa tk IX tahun lalu	3.423	2	3.425
	Siswa seluruh tahun lalu	11.573	963	12.536
3	Mengulang	111	3	114
4	Putus Sekolah	63	11	74
5	Lulusan	3.612	478	4.090
6	KS dan Guru menurut Ijazah	491	196	687
	a. <S1/D4	80	65	145
	b. S1/D4 & lebih tinggi	411	131	542
	KS dan Guru menurut Status Kepeg	538	196	734
	a. PNS	491	34	525
	b. Non-PNS	47	162	209
	Kepala Sekolah	93	17	110
	a. Bersertifikat	53	8	61
	b. Belum bersertifikat	40	9	49
	Guru	392	161	553
	a. Bersertifikat	159	36	195
	b. Belum bersertifikat	233	125	358

Sumber: Sheet TabGrafSMP

Berdasarkan Tabel 3.15 terdapat 5 jenis data SDM untuk SMP/MTs. Jumlah siswa SMP/MTs seluruhnya sebesar 12.913 dengan rincian negeri sebesar 12.314 dan swasta sebesar 599. Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa usia <13 tahun sebesar 2.113, usia 13-15 tahun sebesar 9.001, dan >15 tahun sebesar 3.162. Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki sebesar 6.478 dan perempuan sebesar 7.798. Siswa mengulang SMP/MTs sebesar 114, putus sekolah sebesar SMP/MTs 74, dan lulusan SMP/MTs sebesar 4.090 siswa. Kepala sekolah dan guru yang mengajar di SMP/MTs sebanyak 687 orang. Yang memiliki kualifikasi S1 dan lebih rendah sebesar 145 orang, sedangkan S1/D4 dan lebih tinggi sebesar 542 orang. Kepala sekolah dan guru PNS SMP/MTs sebesar 525 orang dan sisanya bukan PNS sebesar 209 orang. Kepala sekolah SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat sebesar 61 dan yang belum memiliki sertifikat sebesar 49. Guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat sebesar 195 dan belum memiliki sertifikat sebesar 358.

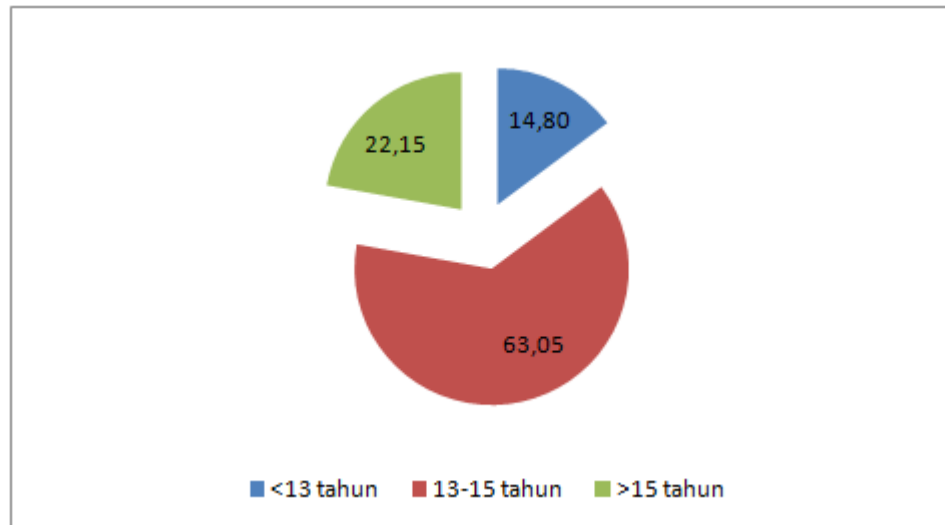
Grafik 3.15
Sumber Daya Manusia SMP
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSMP

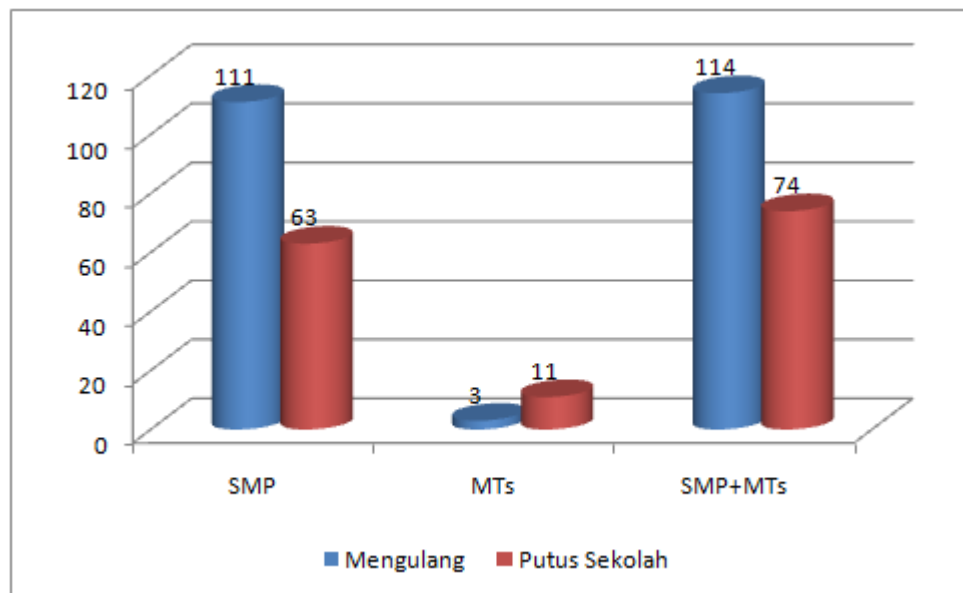
Siswa usia sekolah jenjang SMP sangat penting diketahui dalam menghitung angka partisipasi murni (APM). Berdasarkan Tabel 3.15 dan Grafik 3.16 diketahui bahwa siswa SMP usia terbesar pada usia 13-15 tahun sebesar 7.353 karena memang merupakan usia resmi bersekolah di jenjang SMP. Namun, yang masuk di SMP pada usia kurang 13 tahun sebesar 2.516 anak dan lebih kecil daripada yang usia lebih besar 15 tahun sebesar 3.453 karena pernah mengulang atau ketika masuk SMP usianya sudah lebih dari 13 tahun.

Grafik 3.16
*Siswa Usia Sekolah SMP
 Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2017*



Sumber: Sheet TabGrafSMP

Grafik 3.17
*Mengulang dan Putus Sekolah SMP
 Kabupaten Kapuas Hulu
 Tahun 2017*

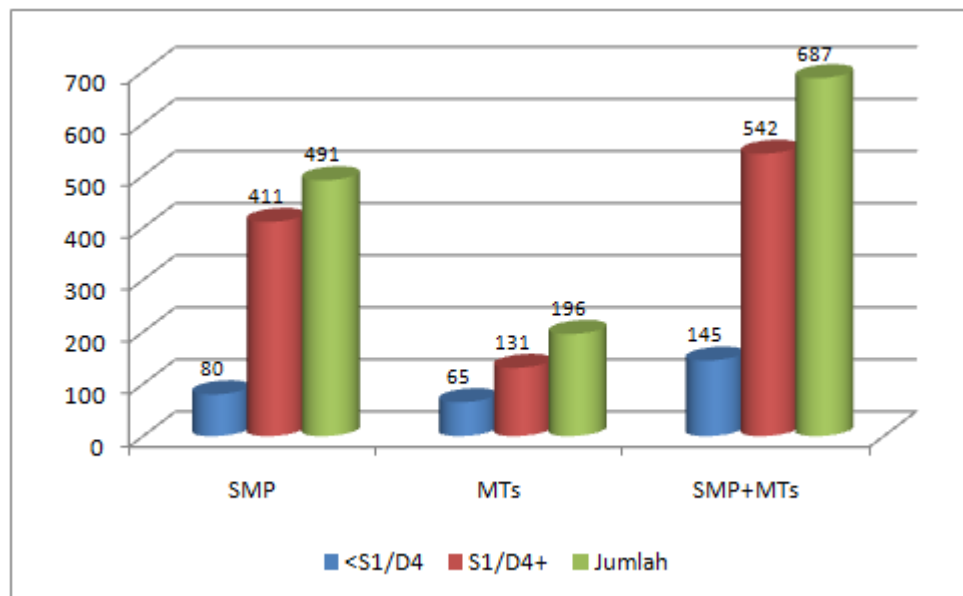


Sumber: Sheet TabGrafSMP

Bila dibandingkan antara mengulang dan putus sekolah SMP yang terdapat pada Tabel 3.15 dan Grafik 3.17 ternyata di Kabupaten Kapuas Hulu siswa mengulang pada SMP/MTs sebesar 114 orang. Putus sekolah pada SMP/MTs sebesar 74 orang. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka mengulang yang besar pada SMP/MTs harus segera ditanggulangi melalui program remedial. Hal yang sama untuk putus sekolah yang besar pada SMP/MTs hendaknya ditanggulangi melalui program retrieval sehingga anak yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah atau dapat masuk di program Paket B dalam rangka peningkatan mutu di SMP/MTs.

Kelayakan mengajar guru menggunakan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No.14/2005). Guru layak mengajar di tingkat SM adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi. Jumlah guru menurut kelayakan mengajar dapat dilihat pada Tabel 3.15 dan Grafik 3.18. Jumlah guru layak mengajar yang terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat di SMP/MTs sebesar 687 orang. Sebaliknya, guru yang tidak layak mengajar di SMP/MTs sebesar 145 dan jumlah keseluruhan guru di SMP/MTs sebesar 687 orang.

Grafik 3.18
Kepala Sekolah dan Guru menurut Ijazah SMP
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSMP

4. Jenjang SM

Berdasarkan Tabel 3.16 terdapat 13 jenis data prasarana SM pada tahun 2016/2017, Jumlah SM sebesar 38 dengan rincian negeri sebesar 27 dan swasta sebanyak 11 sehingga terlihat sekolah negeri lebih banyak. Dilihat dari akreditasi sekolah SM sebesar 5 yang telah terakreditasi A, sebesar 12 terakreditasi B, sebesar 12 terakreditasi C, sedangkan yang belum terakreditasi sebesar 9. Jumlah kelas SM sebesar 275 sedangkan

jumlah ruang kelas SM sebesar 347 ruang dengan rincian dengan kondisi baik sebesar 168 ruang, kondisi rusak ringan sebesar 175 ruang dan kondisi rusak berat sebesar 4 sedangkan ruang kelas bukan milik sebesar 3 ruang. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SM terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 34 dalam kondisi baik sebesar 17 ruang, ruang UKS sebesar 16, dalam kondisi baik sebesar 9, ruang komputer sebesar 2 ruang, dalam kondisi baik sebesar 2 ruang. Untuk laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, komputer, dan multimedia sebesar 72 ruang, dan dalam kondisi baik sebesar 40 ruang.

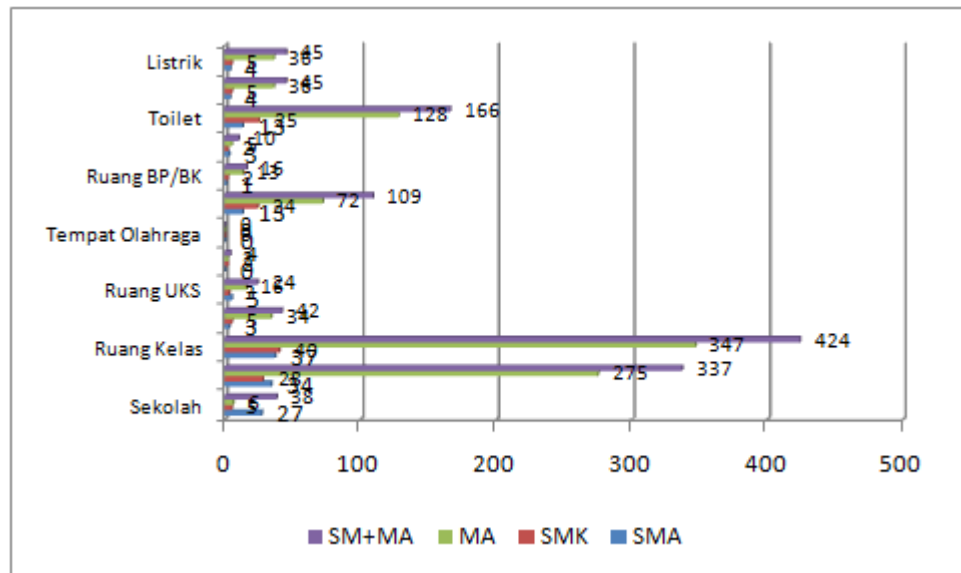
*Tabel 3.16
Data Prasarana SM
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017*

No.	Variabel	SMA	SMK	MA	SM+MA
1	Sekolah Menurut Status	27	5	6	38
	a. Negeri	22	3	2	27
	b. Swasta	5	2	4	11
	Sekolah Menurut Akreditasi	27	5	6	38
	a. Akreditasi A	3	0	2	5
	b. Akreditasi B	8	2	2	12
	c. Akreditasi C	9	1	2	12
	d. Belum Akreditasi	7	2	0	9
2	Kelas/rombongan belajar	241	34	28	275
3	Ruang Kelas menurut Kondisi	270	37	40	347
	a. Baik	115	17	36	168
	b. Rusak Ringan	152	20	3	175
	c. Rusak Berat	3	0	1	4
	RK Bukan Milik	0	0	3	3
4	Perpustakaan	26	3	5	34
	a. Baik	11	1	5	17
	b. Rusak	15	2	0	17
5	Ruang Usaha Kesehatan Sekolah	8	5	3	16
	a. Baik	3	3	3	9
	b. Rusak	5	2	0	7
6	Ruang Komputer	0	0	2	2
	a. Baik	0	0	2	2
	b. Rusak	0	0	0	0
7	Tempat Olahraga	0	0	0	0
	a. Baik	0	0	0	0
	b. Rusak	0	0	0	0
8	Laboratorium Fisika	5	1	1	7
	a. Baik	2	0	1	3
	b. Rusak	3	1	0	4
	Laboratorium Kimia	4	1	2	7
	a. Baik	2	0	2	4
	b. Rusak	2	1	0	3
	Laboratorium Biologi	7	0	2	9
	a. Baik	5	0	2	7
	b. Rusak	2	0	0	2
	Laboratorium Bahasa	1	4	7	12
	a. Baik	0	3	2	5
	b. Rusak	1	1	5	7
	Laboratorium Komputer	18	0	0	18
	a. Baik	11	0	0	11
	b. Rusak	7	0	0	7
	Laboratorium Multimedia	0	7	12	19
	a. Baik	0	3	7	10
	b. Rusak	0	4	5	9
	Laboratorium seluruh	35	13	24	72
	a. Baik	20	6	14	40
	b. Rusak	15	7	10	32
9	Ruang BP/BK	10	1	2	13
10	Ruang Serbaguna	0	3	2	5
11	Toilet	90	13	25	128
12	Air Bersih	27	4	5	36
13	Listrik	27	4	5	36

Sumber: Sheet TabGrafSM

Bila satu ruang kelas jenjang SM diharapkan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar hanya sekali maka terdapat kekurangan atau kelebihan ruang kelas jenjang SMP. Demikian juga untuk perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, ruang BP, ruang serba gun, toilet, air bersih, dan listrik bila setiap sekolah jenjang SM harus memiliki prasarana tersebut maka terdapat kekurangan atau kelebihan prasarana sekolah di jenjang SM.

Grafik 3.19
Prasarana SM
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSM

Tabel 3.17
Kekurangan dan Kelebihan Prasarana Pendidikan SM
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

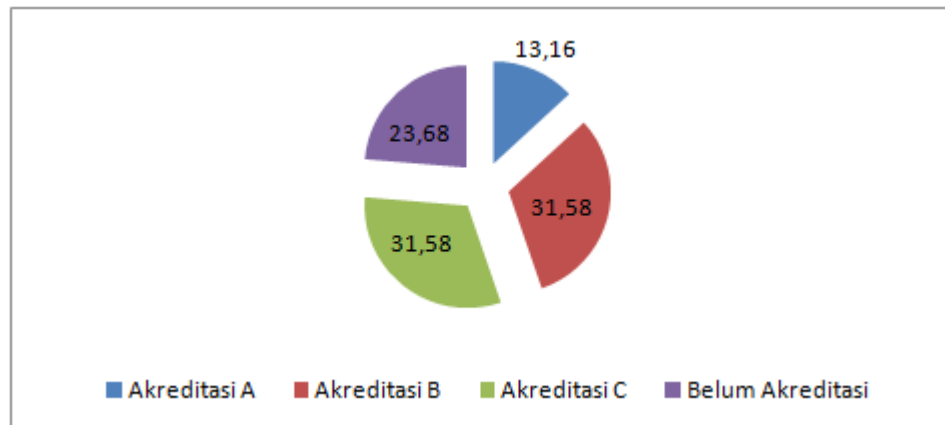
No.	Variabel	SMA	SMK
1	Ruang Kelas	3	12
2	Perpustakaan	-24	-22
3	Ruang UKS	-22	-24
4	Ruang Komputer	-27	-25
5	Tempat Olahraga	-27	-27
6	Laboratorium	-122	-111
7	Ruang BP/BK	-26	-25
8	Ruang Serba Guna	-24	-25
9	Toilet	-14	-2
10	Air Bersih	-23	-22
11	Listrik	-23	-22

Sumber: Sheet TabGrafSM

Berdasarkan Tabel 3.17 disajikan kekurangan atau kelebihan prasarana sekolah SMA dan SMK Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah ruang kelas SMA kelebihan sebesar 3. Ruang kelas yang kelebihan hendaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan anak usia sekolah untuk masuk ke SMA dan SMK sehingga ketersediaan layanan pendidikan dapat dimanfaatkan oleh semua siswa di kabupaten kapuas hulu. Dengan demikian, ketersediaan layanan dapat meningkatkan partisipasi siswa bersekolah di SMA dan SMK.

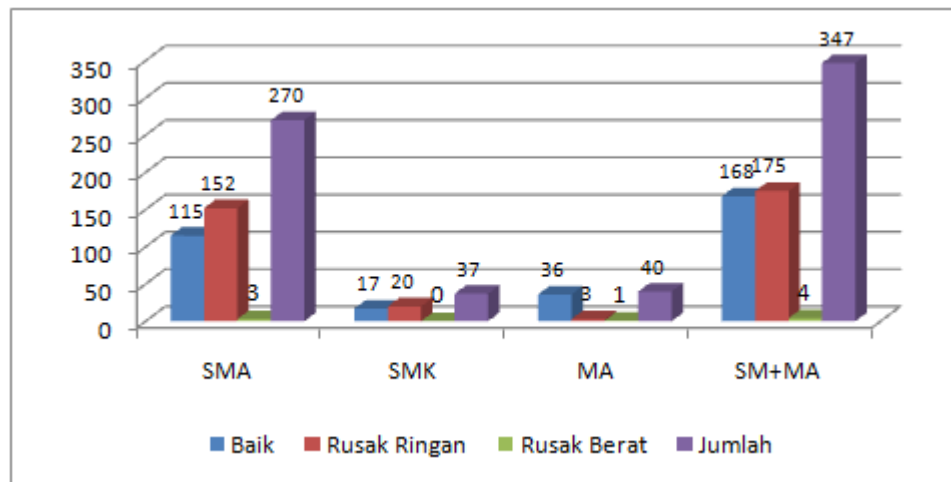
Akreditasi menunjukkan mutu sekolah. Jumlah SMA dan SMK yang telah terakreditasi terdapat pada Tabel 3.16 dan Grafik 3.20 maka akreditasi terbesar adalah B dan C sedangkan terkecil adalah akreditasi A.

Grafik 3.20
Akreditasi Sekolah SM
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSM

Grafik 3.21
Ruang Kelas Menurut Kondisi SMA
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSM

Ruang kelas sebagai prasarana penting sekolah terbagi dalam tiga kondisi, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Jumlah ruang kelas menurut kondisi terdapat pada Tabel 3.16 dan Grafik 3.21. Berdasarkan ruang kelas di Kabupaten Kapuas Hulu, ternyata SMA memiliki ruang kelas yang rusak berat. Jumlah ruang kelas yang baik terbesar terjadi di SMA sebesar 168 ruang dan terkecil terjadi di SMK sebesar 17 ruang. Hal yang sama untuk jumlah ruang kelas rusak berat yang terburuk terbesar terjadi di SMA sebesar 4 ruang.

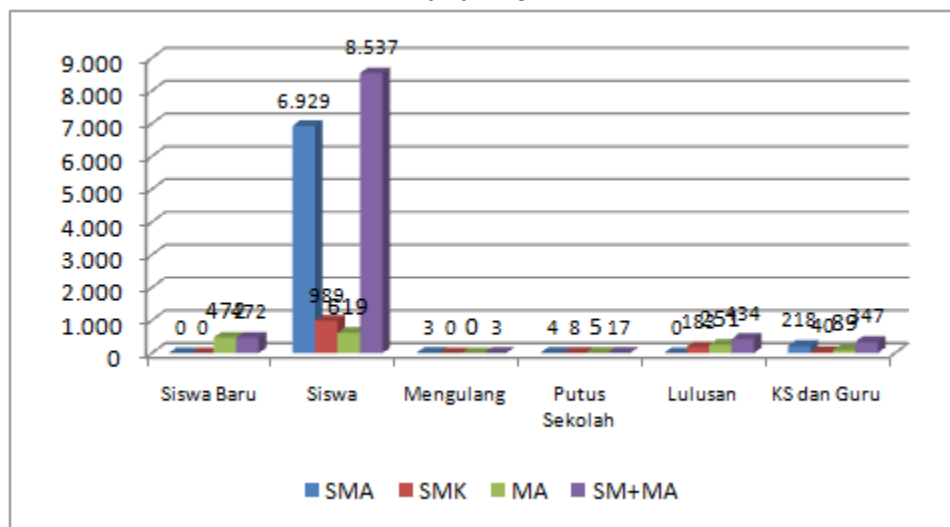
Tabel 3.18
Data Sumber Daya Manusia SM
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Variabel	SMA	SMK	MA	SM+MA
1	Siswa Baru menurut Jenis Kelamin	0	0	472	0
	a. Laki-laki	0	0	218	0
	b. Perempuan	0	0	254	0
	Siswa Baru menurut Asal	0	0	472	0
	a. SMP	0	0	265	0
	b. MTs	0	0	207	0
	c. Paket B	0	0	0	0
2	Siswa Menurut Status	6.929	989	619	7.918
	a. Negeri	6.101	797	509	6.898
	b. Swasta	828	192	110	1.020
	Siswa Menurut Usia Sekolah	6.811	1.053	619	7.864
	a. <16 th	1.212	178	212	1.390
	b. 16-18 th	4.915	753	344	5.668
	c. >18 th	684	122	63	806
	Siswa Laki2 menurut Usia	3.074	559	309	3.633
	a. <16 th	527	93	100	620
	b. 16-18 th	2.282	390	173	2.672
	c. >18 th	265	76	36	341
	Siswa Perempuan menurut Usia	3.737	494	310	4.231
	a. <16 th	685	85	112	770
	b. 16-18 th	2.633	363	171	2.996
	c. >18 th	419	46	27	465
	Siswa tk XII tahun lalu	1.785	176	143	1.961
	Siswa seluruh tahun lalu	6.350	652	609	7.002
3	Mengulang	3	0	0	3
4	Putus Sekolah	4	8	5	12
5	Lulusan	0	183	251	183
6	KS dan Guru menurut Ijazah	218	40	89	258
	a. <S1/D4	4	0	5	4
	b. S1/D4 & lebih tinggi	214	40	84	254
	KS dan Guru menurut Status Kepeg	441	66	79	507
	a. PNS	218	40	19	258
	b. Non-PNS	223	26	60	249
	Kepala Sekolah	26	4	5	30
	a. Bersertifikat	18	3	2	21
	b. Belum bersertifikat	8	1	3	9
	Guru	417	62	84	479
	a. Bersertifikat	74	16	12	90
	b. Belum bersertifikat	343	46	72	389

Sumber: Sheet TabGrafSM

Berdasarkan Tabel 3.18 pada tahun 2016/2017 terdapat 6 jenis data SDM SM Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah siswa SM seluruhnya sebesar siswa dengan rincian negeri sebesar 6.898 dan swasta sebesar 1.020. Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa <16 tahun sebesar 1.390, 16-18 tahun sebesar 5.668, dan >18 tahun sebesar 806. Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki sebesar 3.633 dan perempuan sebesar 4.231. Jumlah siswa tingkat XII SM tahun lalu sebesar 1.961 dan siswa SM seluruhnya sebesar 7.002. Jumlah mengulang SM sebesar 3, jumlah putus sekolah SM sebesar 12, dan lulusan SM sebesar 183. Kepala sekolah dan guru yang mengajar di SM sebanyak 258, yang memiliki kualifikasi kurang dari S1 sebesar 4 dan yang memiliki kualifikasi S1/D4 dan lebih tinggi sebesar 254. Kepala sekolah SM yang telah memiliki sertifikat sebanyak 21 dan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 9. Guru SM yang telah memiliki sertifikat sebanyak 90 dan belum memiliki sertifikat sebanyak 389.

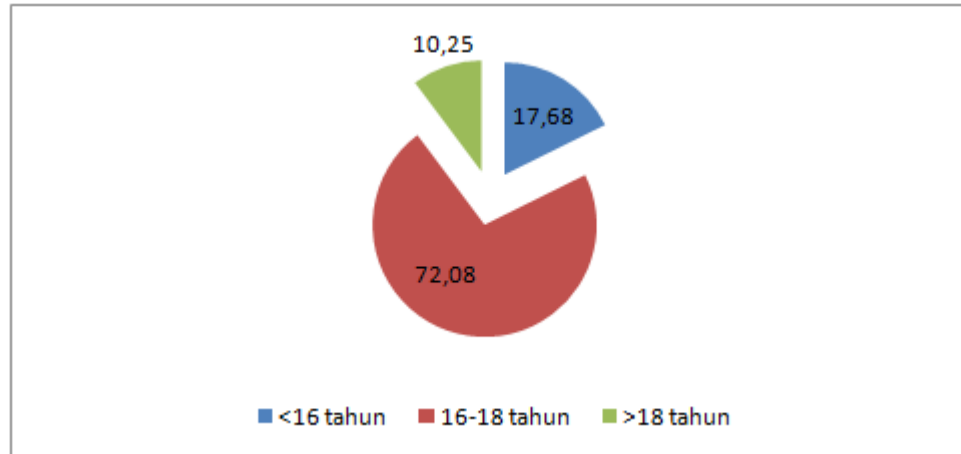
Grafik 3.22
Sumber Daya Manusia SM
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSM

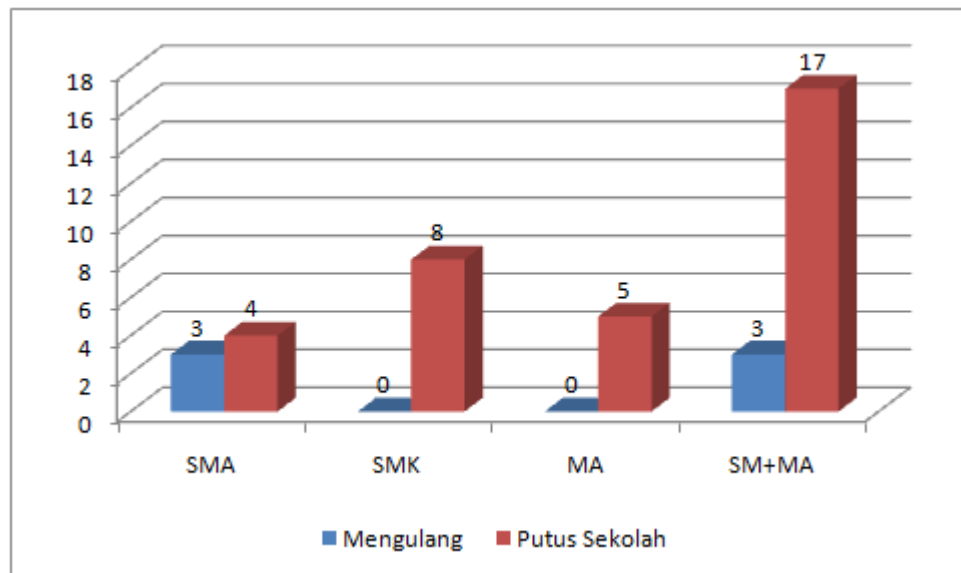
Bila dibandingkan antara mengulang dan putus sekolah SMA dan SMK yang terdapat pada Tabel 3.18 dan Grafik 3.24 ternyata di Kabupaten Kapuas Hulu mengulang pada jenjang SMA dan SMK sebesar 3 orang, sedangkan Putus sekolah pada jenjang SMA dan SMK sebesar 12 orang. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka mengulang yang besar pada SMA dan harus segera ditanggulangi melalui program remedial. Hal yang sama untuk putus sekolah yang besar pada SMA dan SMK hendaknya ditanggulangi melalui program retrieval sehingga anak yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah atau dapat masuk di program Paket C dalam rangka peningkatan mutu di SMA dan SMK.

Grafik 3.23
Siswa menurut Kelompok Usia Sekolah SM
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSM

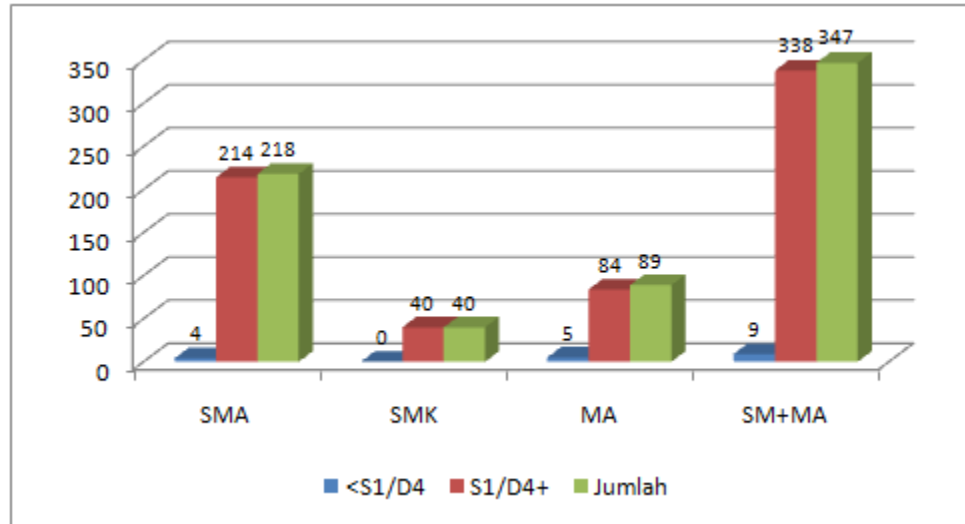
Grafik 3.24
Mengulang dan Putus Sekolah SM
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSM

Kelayakan mengajar guru menggunakan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005). Guru layak mengajar di tingkat SM adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi. Jumlah guru menurut kelayakan mengajar dapat dilihat pada Tabel 3.18 dan Grafik 3.25. Jumlah guru layak mengajar yang terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat di SMA dan SMK sebesar 254 orang, Sebaliknya, guru yang tidak layak mengajar di SMA dan SMK sebesar 4 orang

Grafik 3.25
Kepala Sekolah dan Guru menurut Ijazah SM
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafSM

5. PAUD dan Nonformal

Berdasarkan Tabel 3.19 terdapat data PAUD dan Nonformal yang terdiri dari pendidikan keaksaraan, PAUD, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan berkelanjutan. Lembaga hanya terdapat pada PAUD dan Kursus, sedangkan kelompok belajar pada pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, KBH dan KBU. Pada tahun 2017 Kabupaten Kapuas Hulu memiliki lembaga PAUD sebesar 232, dengan rincian KB sebesar 204 dan TK sebesar 28 sedangkan kursus sebesar 5. Jumlah kelompok belajar pendidikan kesetaraan sebesar 27, dengan rincian Paket A sebesar 20, Paket B sebesar 4, dan Paket C sebesar 3 sedangkan PKH sebesar 5 kelompok belajar.

Peserta didik Peserta didik PAUD sebesar 12.120 dengan rincian KB sebesar 6.060 dan TK sebesar 6.060. Peserta didik kesetaraan sebesar 752 terdiri dari Paket A sebesar 58, Paket B sebesar 231, Dan Paket C sebesar 463. Peserta didik pendidikan berkelanjutan sebesar 175 dengan rincian Kursus sebesar 40, dan PKH sebesar 135 peserta didik.

Pendidik pada PAUD sebesar 521 dengan rincian KB sebesar 403 orang dan TK sebesar 118. Pendidik pendidikan kesetaraan sebesar 164 yang berada di Paket A sebesar 23, Paket B sebesar 61 dan Paket C sebesar 80, sedangkan pendidik terbesar pada Paket C dan terkecil pada Paket A. Pengelola PAUD sebesar 28 dengan rincian TK sebesar 28. Pengelola pendidikan kesetaraan sebesar 8 yang berada di Paket A sebesar 3 dan Paket B sebesar 5 pengelola.

Tabel 3.19
Data PAUD dan Nonformal
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Program	Lembaga	Kelompok Belajar	Peserta Didik	Pendidik/Tutor	Pengelola
1	Pendidikan Keaksaraan		86	8.768	10	0
2	PAUD	232		12.120	521	28
	a. KB	204		6.060	403	0
	b. TPA	0		0	0	0
	c. SPS	0		0	0	0
	d. TK	28	79	6.060	118	28
3	Pendidikan Kesetaraan		27	752	164	8
	a. Paket A Setara SD		20	58	23	3
	b. Paket B Setara SMP		4	231	61	5
	c. Paket C Setara SMA		3	463	80	0
4	Pendidikan Berkelanjutan	5	5	175	19	1
	a. Kursus	5		40	9	0
	b. PKH		5	135	10	0
	c. KBU		0	0	0	1

Sumber: Sheet TabGrafSM

BAB IV

KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Pada Bab IV kinerja pendidikan dasar dan menengah dimulai dengan kinerja dipandang dari tiga pilar kebijakan pendidikan yang dijabarkan menjadi misi pendidikan 5K, yaitu misi K1 meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, misi K2 memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, misi K3 meningkatkan kualitas layanan pendidikan, misi K4 mewujudkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan, dan misi K5 menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Kelima misi pendidikan 5K atau kinerja pendidikan tersebut diterapkan pada setiap jenjang pendidikan, yaitu tingkat SD, SMP, dan SM.

A. Ketersediaan Layanan Pendidikan: Misi Pendidikan K1

Untuk mengetahui ketersediaan layanan pendidikan maka digunakan 8 indikator yang terkait dengan prasarana pendidikan, yaitu tiga jenis rasio seperti R-S/Sek, R-S/K, R-K/RK, dan 5 jenis prasarana seperti %Perpus, %RUKS, %Rkom, %TOR, dan %Lab.

Tabel 4.1
Indikator Ketersediaan Layanan Pendidikan: Misi K1
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM
1	Rasio Siswa per Sekolah (R-S/Sek)	78,50	116,33	226,21
2	Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)	12,89	24,23	28,37
3	Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)	1,07	0,93	0,87
4	Persentase Perpustakaan (%Perpus)	27,59	73,87	89,47
5	Persentase Ruang UKS (%RUKS)	2,36	20,72	42,11
6	Persentase Ruang Komputer (%Rkom)	0,94	12,61	5,26
7	Persentase Tempat Olahraga (%TOR)	16,75	101,80	2,63
8	Persentase Laboratorium (%Lab)	-	44,14	18,86

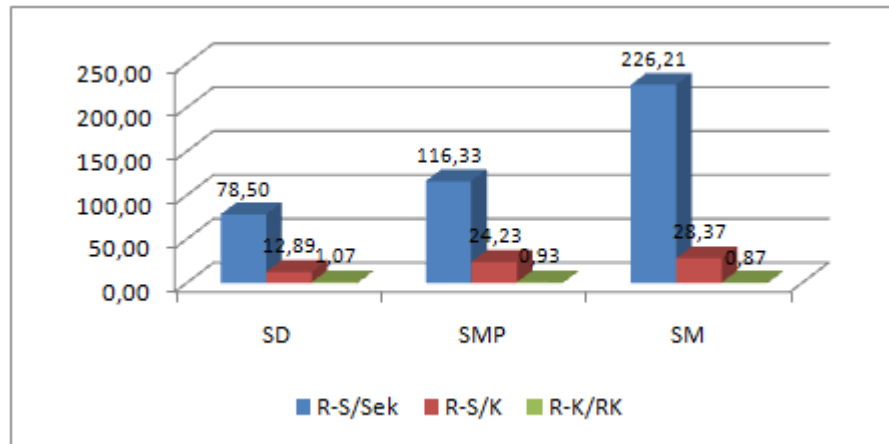
Sumber: Sheet TabGrafMisi

Berdasarkan Tabel 4.1 terdapat 8 jenis indikator ketersediaan layanan pendidikan. R-S/Sek Kabupaten Kapuas Hulu terbesar pada jenjang SM sebesar 226,21 artinya sekolah yang terpadat dan terkecil pada jenjang SD sebesar 78,50 artinya sekolah yang terjarang. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sekolah untuk jenjang SD sebesar 78,50., efisiensi penggunaan sekolah untuk jenjang SMP sebesar 116,33 dan efisiensi penggunaan sekolah untuk jenjang SM sebesar 226,21.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 23, Tahun 2013 (Permendikbud 23/2013), R-S/K SD sebesar 32 sedangkan SMP dan SM sebesar 36. Pada kenyataannya, R-S/K Kabupaten Kapuas Hulu terbesar pada jenjang SM sebesar 28,37 artinya kelas yang terpadat dan terkecil pada jenjang SD sebesar 12,89 artinya kelas yang terjarang.

Dengan demikian, efisiensi penggunaan kelas untuk jenjang SD sebesar 12,89., efisiensi penggunaan kelas untuk jenjang SMP sebesar 24,23 dan efisiensi penggunaan kelas untuk jenjang SM sebesar 28,37. Hal ini menunjukkan jenjang SM yang paling efisien jika dibandingkan dengan jenjang lainnya walaupun semuanya belum mencapai standar R-S/K.

Grafik 4.1
Rasio Pendidikan Dikdasmen
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafMisi

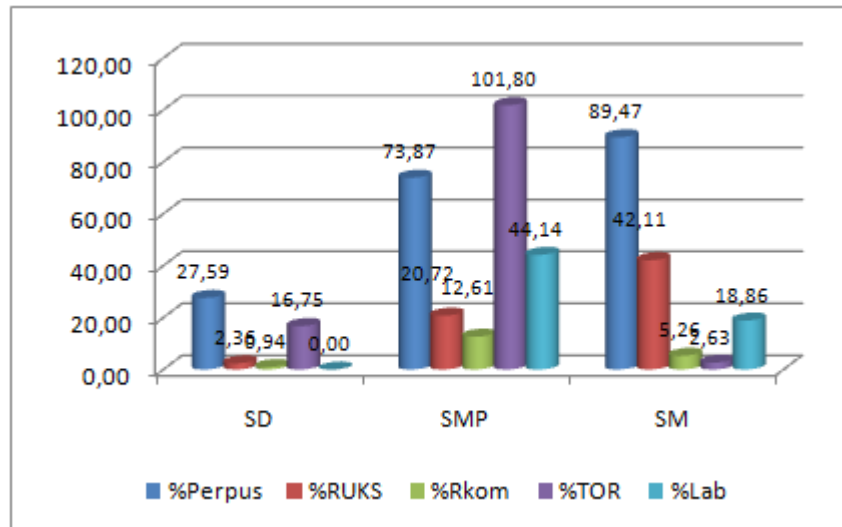
R-K/RK yang ideal adalah 1. Pada kenyataannya, R-K/RK Kabupaten Kapuas Hulu terbesar pada jenjang SD sebesar 1,07 artinya terdapat 181 masih kekurangan ruang kelas dan terkecil pada jenjang SM sebesar 0,87 artinya terdapat 3 masih kekurangan ruang kelas. Oleh karena itu, jenjang SD dan SM yang masih kekurangan ruang kelas agar segera dipenuhi sehingga dapat menampung siswa jenjang SD dan SM agar partisipasi siswa meningkat. Sebaliknya, jenjang SMP yang telah kelebihan ruang kelas agar diusahakan memasukkan siswa sehingga tidak terjadi kekosongan ruang kelas.

Masih pada Tabel 4.1, %Perpus yang ideal adalah 100%. Pada kenyataannya, %Perpus Kabupaten Kapuas Hulu terbesar terjadi pada jenjang SM sebesar 89,47 dan terkecil pada jenjang SD sebesar 27,59. Untuk jenjang SD terdapat 72,41% sekolah belum memiliki perpustakaan, jenjang SMP terdapat 26,13% sekolah belum memiliki perpustakaan, dan jenjang SM terdapat 10,53% sekolah belum memiliki perpustakaan.

%RUKS yang ideal adalah 100%. Pada kenyataannya, %RUKS Kabupaten Kapuas Hulu terbesar terjadi pada jenjang SM sebesar 42,11 dan terkecil pada jenjang SD sebesar 2,36. Untuk jenjang SD terdapat 97,64% sekolah belum memiliki ruang UKS, jenjang SMP terdapat 79,28% sekolah belum memiliki ruang UKS, dan jenjang SM terdapat 57,89% sekolah belum memiliki ruang UKS.

%RKom yang ideal adalah 100%. Pada kenyataannya, %RKom Kabupaten Kapuas Hulu terbesar terjadi pada jenjang SM sebesar 5,26% dan terkecil pada jenjang SD sebesar 0,94%. Untuk jenjang SD terdapat 99,06% sekolah belum memiliki ruang komputer, jenjang SMP terdapat 87,39% sekolah belum memiliki ruang komputer, dan jenjang SM terdapat 94,74% sekolah belum memiliki ruang komputer.

Grafik 4.2
Persentase Prasarana Pendidikan
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafMisi

%TOR yang ideal adalah 100%. Pada kenyataannya, %TOR Kabupaten Kapuas Hulu terbesar terjadi pada jenjang SMP sebesar 101,80% dan jenjang SD sebesar 16,75% sedangkan untuk jenjang SM lebih kecil sebesar 2,36. %Lab hanya pada jenjang SMP dan SM. %Lab Kabupaten Kapuas Hulu jenjang SMP sebesar 44,14% lebih besar jika dibandingkan dengan jenjang SM sebesar 18,86%.

Tabel 4.2
Kinerja Ketersediaan Layanan Pendidikan: Misi K1
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM
1	Rasio Siswa per Sekolah (R-S/Sek)	100,00	100,00	100,00
2	Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)	100,00	100,00	100,00
3	Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)	93,22	92,70	87,32
4	Persentase Perpustakaan (%Perpus)	27,59	73,87	89,47
5	Persentase Ruang UKS (%RUKS)	2,36	20,72	42,11
6	Persentase Ruang Komputer (%Rkom)	0,94	12,61	5,26
7	Persentase Tempat Olahraga (%TOR)	16,75	101,80	2,63
8	Persentase Laboratorium (%Lab)	-	44,14	18,86
	Kinerja Ketersediaan	48,69	68,23	55,71

Berdasarkan standar untuk konversi yang terdapat pada Tabel 2.1 maka indikator ketersediaan telah dikonversi menjadi nilai ketersediaan yang terdapat pada Tabel 4.2. Nilai ketersediaan paling ideal adalah 100 dan paling buruk adalah 0, kemudian dengan

mengambil rata-rata nilai ke-8 indikator tersebut dihasilkan kinerja ketersediaan layanan SD, layanan SMP, dan layanan SM. R-S/Sek Kabupaten Kapuas Hulu setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 78,50 jenjang SMP menjadi 116,33 dan jenjang SM menjadi 226,21 R-S/K setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 12,89 jenjang SMP menjadi 24,23 dan jenjang SM menjadi 28,37. R-K/RK setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 1,07, jenjang SMP menjadi 0,93 dan jenjang SM menjadi 0,87. %Perpus untuk jenjang SD menjadi 27,59 jenjang SMP menjadi 73,87 dan jenjang SM menjadi 89,47 %RUKS setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 2,36 jenjang SMP menjadi 20,72 dan jenjang SM menjadi 42,11. %RKom untuk jenjang SD menjadi 0,94, jenjang SMP menjadi 12,61 dan jenjang SM menjadi 5,26. %TOR setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 16,75 jenjang SMP menjadi 101,80 dan jenjang SM menjadi 2,63. %Lab untuk jenjang SMP menjadi 44,14 dan jenjang SM menjadi 18,86.

Dengan demikian, kinerja ketersediaan jenjang SD menjadi 48,69 jenjang SMP menjadi 68,23 dan jenjang SM menjadi 55,71. Dalam ketersediaan layanan ternyata jenjang SMP yang terbaik dan jenjang SD yang terburuk.

B. Keterjangkauan Layanan Pendidikan: Misi Pendidikan K2

Untuk mengetahui keterjangkauan layanan pendidikan maka digunakan 3 indikator, yaitu TPS, DT, dan SB. Ketiga indikator ini belum memiliki standar yang ideal, oleh karena itu digunakan angka nasional sebagai standar.

Tabel 4.3
Indikator Keterjangkauan Layanan Pendidikan: Misi K2
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM
1	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)	19,80	57,56	80,99
2	Daerah Terjangkau (DT)	66,17	136,55	331,71
3	Satuan Biaya (SB)	0,00	0,00	0,00

Sumber: Sheet TabGrafMisi

Keterjangkauan layanan pendidikan yang terdiri dari 3 indikator disajikan pada Tabel 4.3. Keterjangkauan layanan pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu yang berasal dari TPS terbesar adalah jenjang SM sebesar 80,99 yang berarti layanan sekolah yang terburuk karena melayani terbanyak sehingga jangkauannya kurang dan terkecil adalah jenjang SD sebesar 19,80 yang berarti layanan sekolah yang terbaik karena melayani lebih sedikit siswa sehingga keterjangkauannya besar. Bila dilihat dari DT maka jenjang SM memiliki nilai terbesar sebesar 331,71 yang berarti memiliki jangkauan terluas sedangkan jenjang SD memiliki nilai terkecil sebesar 66,17 yang berarti memiliki jangkauan terkecil.

Tabel 4.4
Kinerja Keterjangkauan Layanan Pendidikan Misi K2
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM
1	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)	100,00	100,00	82,73
2	Daerah Terjangkau (DT)	100,00	100,00	100,00
3	Satuan Biaya (SB)	0,00	0,00	0,00
	Kinerja Keterjangkauan	66,67	66,67	60,91

Sumber: Sheet TabGrafKinerja

Berdasarkan standar untuk konversi yang terdapat pada Tabel 2.1 maka indikator keterjangkauan telah dikonversi menjadi nilai keterjangkauan yang terdapat pada Tabel 4.4. Nilai keterjangkauan paling ideal adalah 100 dan paling buruk adalah 0, kemudian dengan mengambil rata-rata nilai ke-3 indikator tersebut dihasilkan kinerja keterjangkauan layanan SD, layanan SMP, dan layanan SM. TPS Kabupaten Kapuas Hulu setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 100 jenjang SMP menjadi 100 dan jenjang SM menjadi 82,73. DT setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 100, jenjang SMP 100 dan jenjang SM menjadi 100.

Dengan demikian, kinerja keterjangkauan jenjang SD menjadi 66,67 jenjang SMP menjadi 66,67 dan jenjang SM menjadi 60,91. Dalam keterjangkauan layanan ternyata jenjang SD dan SMP yang terbaik dan jenjang SM yang terburuk.

C. Kualitas Layanan Pendidikan: Misi K3

Untuk dapat melihat kualitas layanan pendidikan maka digunakan 12 indikator, enam indikator berasal dari sumber daya manusia dan enam indikator berasal dari prasarana pendidikan yang terdapat pada Tabel 4.5. Kualitas pendidikan dilihat dari sumber daya manusia terdiri dari masukan, yaitu %SB TK, dari sudut guru, yaitu R-S/G dan %GL, dari sudut siswa itu sendiri melalui AL, AU, dan APS, dari prasarana yang dimiliki, yaitu %RKb, %Perpusb, %RUKSb, %Rkomb, %TORb, dan %Labbb yang menunjang kegiatan belajar mengajar.

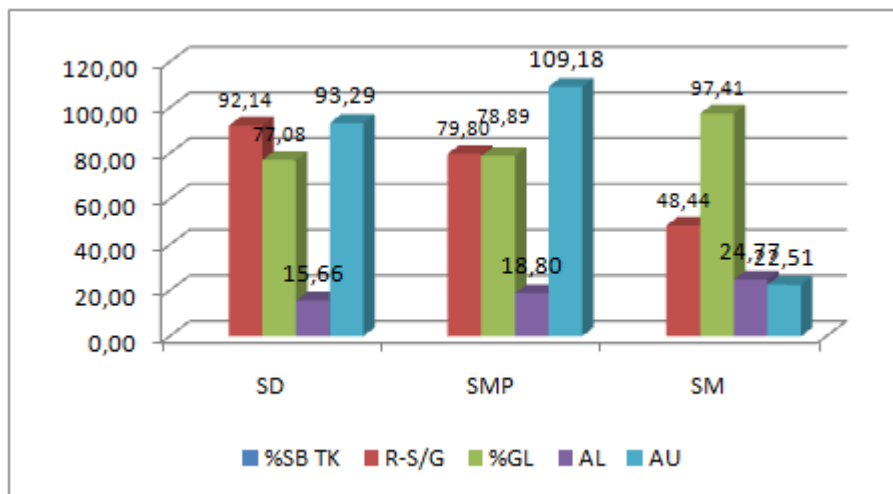
Berdasarkan Tabel 4.5 dan Grafik 4.2, dan Permendiknas Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Permendiknas 14/2005) menyebutkan bahwa guru SD sampai SM yang layak mengajar adalah yang berijazah S1 atau D4 dan yang lebih tinggi. %GL terbesar terdapat di jenjang SM sebesar 97,41% dan yang terkecil pada jenjang SD sebesar 77,08%. Dengan demikian, masih diperlukan penyetaraan guru jenjang SD sebesar 22,92%, jenjang SMP sebesar 21,11%, dan jenjang SM sebesar 2,9%. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan maka guru pada semua jenjang yang belum layak mengajar harus disetarakan dan merupakan kebijakan yang diprioritaskan oleh pemerintah sehingga kelayakan mengajar guru akan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan.

Tabel 4.5
Indikator Kualitas Layanan Pendidikan: Misi K3
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM
1	Persentase Siswa Baru TK (%SB TK)		-	-
2	Persentase Guru Layak (%GL)	77,08	78,89	97,41
3	Rasio Siswa per Guru (R-S/G)	15,66	18,80	24,77
4	Angka Lulusan (AL)	93,29	109,18	22,51
5	Angka Mengulang (AU)	4,83	0,91	0,04
6	Angka Putus Sekolah (APS)	0,05	0,59	0,24
7	Persentase Ruang Kelas baik (%RKb)	24,01	26,26	48,41
8	Persentase Perpustakaan baik (%Perpusb)	20,75	19,82	44,74
9	Persentase Ruang UKS baik (%RUKSb)	1,89	9,01	23,68
10	Persentase Ruang Komputer baik (%Rkomb)	0,47	2,70	5,26
11	Persentase Tempat Olahraga baik (%TORb)	11,79	95,50	0,00
12	Persentase Laboratorium baik (%Labbb)	-	12,61	68,42

Sumber: Sheet TabGrafMisi

Grafik 4.3
Persentase Kualitas SDM Pendidikan
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



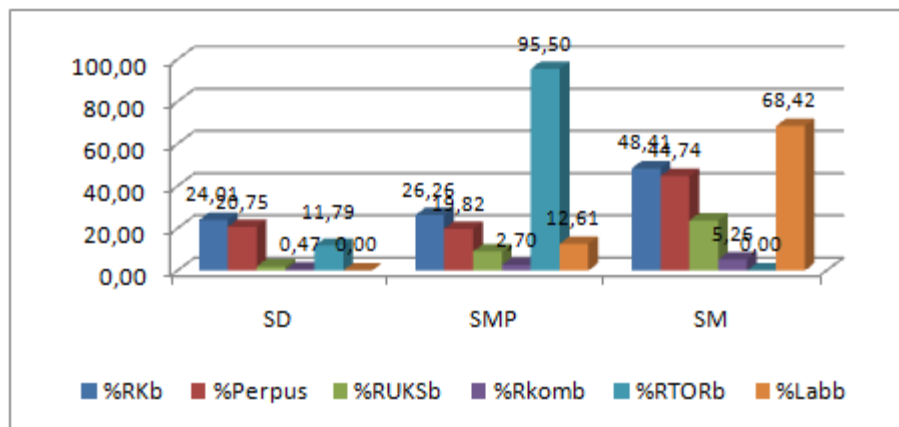
Sumber: Sheet TabGrafMisi

Bidang studi di jenjang SM lebih banyak dari pada jenjang SMP sehingga guru jenjang SM seharusnya juga lebih banyak dari pada jenjang SMP, sedangkan guru jenjang SD adalah guru kelas sehingga gurunya paling kecil. Pada kenyataannya, R-S/G terbesar terjadi pada jenjang SM sebesar 24,77 dan terkecil pada jenjang SD sebesar 15,66. AL yang ideal adalah 100%. AL terbesar terjadi pada jenjang SMP sebesar 109,18% dan terkecil pada jenjang SM sebesar 22,51%. Besarnya AL yang melebihi 100% di jenjang SD, SMP dan SM akibat adanya lulusan dari jenjang yang setara sedangkan pembaginya hanya dari jenjang SD, SMP dan SMA. AU yang ideal adalah 0%.

AU terbaik dengan nilai terkecil terjadi di jenjang SMP sebesar 109,18, yang terburuk dengan nilai terbesar terjadi di jenjang SM sebesar 22,51. APS yang ideal adalah 0%. APS terbaik dengan nilai terkecil terjadi di jenjang SD sebesar 0,05 yang terburuk dengan nilai terbesar terjadi di jenjang SM sebesar 0,59.

Untuk meningkatkan kualitas prasarana pendidikan maka semua prasarana yang baik harusnya 100%. Prasarana tersebut terdiri dari %RKb, %Perpus, %RUKSb, %Rkomb, %TORb, dan %LABb. Berdasarkan pada Tabel 4.5 dan Grafik 4.4 maka %RKb terbesar di jenjang SM sebesar 48,41% dan terkecil di jenjang SD sebesar 24,01%. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian pemerintah terhadap ruang kelas yang rusak berat agar segera direhabilitasi.

Grafik 4.4
Persentase Kualitas Prasarana Pendidikan
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafMisi

Prasarana lainnya adalah perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, dan laboratorium. %Perpusb yang ideal sebesar 100%. %Perpus terbaik pada jenjang SM sebesar 68,42% dan terburuk pada jenjang SMP sebesar 12,61%. Bila mutu SD harus sama dengan SMP dan SM maka perlu kebijakan khusus dengan memberi prioritas rehabilitasi perpustakaan SD. %RUKSb yang ideal sebesar 100%. %RUKS terbaik pada jenjang SM sebesar 5,26% dan terburuk pada jenjang SD. %Rkomb yang ideal sebesar 100%. %Rkomb terbaik pada jenjang SM sebesar 5,26% dan terburuk pada jenjang SD. Sebaliknya, %Labbb yang ideal sebesar 100%, %Labbb jenjang SMP sebesar 12,61% lebih kecil dari pada jenjang SM sebesar 68,42% . Hal ini berarti peningkatan mutu prasarana di jenjang SD, SMP, dan SM masih perlu diupayakan melalui rehabilitasi sehingga semua prasarana menjadi baik seluruhnya. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian pemerintah terhadap prasarana sekolah yang rusak.

Tabel 4.6
Kinerja Kualitas Layanan Pendidikan Misi K3
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM
1	Persentase Siswa Baru TK (%SB TK)			
2	Persentase Guru Layak (%GL)	77,08	78,89	97,41
3	Rasio Siswa per Guru (R-S/G)	92,14	79,80	48,44
4	Angka Lulusan (AL)	93,29	109,18	22,51
5	Angka Mengulang (AU)	4,83	0,91	0,04
6	Angka Putus Sekolah (APS)	0,05	0,59	0,24
7	Persentase Ruang Kelas baik (%RKB)	24,01	26,26	48,41
8	Persentase Perpustakaan baik (%Perpusb)	20,75	19,82	44,74
9	Persentase Ruang UKS baik (%RUKSb)	1,89	9,01	23,68
10	Persentase Ruang Komputer baik (%Rkom)	0,47	2,70	5,26
11	Persentase Tempat Olahraga baik (%TOR)	11,79	95,50	0,00
12	Persentase Laboratorium baik (%Labbb)		12,61	68,42
	Kinerja Kualitas	32,63	39,57	32,65

Sumber: Sheet TabGrafKinerja

Berdasarkan standar untuk konversi yang terdapat pada Tabel 2.1 maka indikator kualitas layanan telah dikonversi menjadi nilai kualitas yang terdapat pada Tabel 4.6. Nilai kualitas paling ideal adalah 100 dan paling buruk adalah 0, kemudian dengan mengambil rata-rata nilai ke-11 indikator tersebut dihasilkan kinerja kualitas layanan SD, layanan SMP, dan layanan SM. Pada kenyataannya, %GL Kabupaten Kapuas Hulu setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 77,08 jenjang SMP 78,89 dan jenjang SM menjadi 97,41. R-S/G setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 92,14 jenjang SMP 79,80 Dan jenjang SM menjadi 48,44. AL untuk jenjang SD menjadi 93,29 jenjang SMP 109,18 Dan jenjang SM menjadi 22,51. AU untuk jenjang SD menjadi 4,38 jenjang SMP 0,91 Dan jenjang SM menjadi 0,04. APS untuk jenjang SD menjadi 0,05 jenjang SMP 0,59 Dan jenjang SM menjadi 0,24.

Dilihat dari prasarana sekolah maka %RKB untuk jenjang SD menjadi 24,01 jenjang SMP 26,26 Dan jenjang SM menjadi 48,41. %Perpusb untuk jenjang SD menjadi 20,75 jenjang SMP 19,82 Dan jenjang SM menjadi 44,74. %RUKSb untuk jenjang SD menjadi 1,89 jenjang SMP 9,01 Dan jenjang SM menjadi 23,68. %Rkom untuk jenjang SD 0,47 jenjang SMP 2,70 Dan jenjang SM menjadi 5,26. %TOR untuk jenjang SD 11,75 jenjang dan jenjang menjadi SMP 95,50. %Labbb untuk jenjang SMP 12,61 Dan jenjang SM menjadi 68,42.

Dengan demikian, kinerja kualitas layanan jenjang SD menjadi 32,63 jenjang SMP menjadi 39,57 dan jenjang SM menjadi 32,65. Dalam kualitas layanan ternyata jenjang SMP yang terbaik dan jenjang SM yang terburuk.

D. Kesenjangan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K4

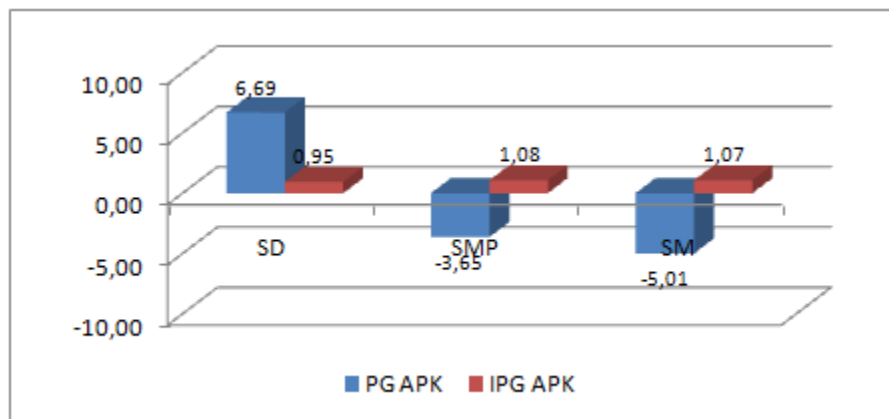
Untuk dapat melihat kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan maka digunakan ukuran dari segi jenis kelamin seperti PG APK dan IPG APK serta dari segi status sekolah seperti %S-Swt.

Tabel 4.7
Indikator Kesenjangan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K4
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM
1	Perbedaan Gender APK (PG APK)	6,69	-3,65	-5,01
2	Indeks Paritas Gender APK (IPG APK)	0,95	1,08	1,07
3	Persentase Siswa Swasta (%S-Swt)	9,02	4,64	13,15

Sumber: Sheet TabGrafMisi

Grafik 4.5
PG dan IPG APK
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafMisi

PG APK yang ideal adalah 0,00%. Berdasarkan Tabel 4.7 dan Grafik 4.5, PG APK pada jenjang SD sebesar 6,69, jenjang SMP -3,65 dan jenjang SM -5,01. IPG yang ideal adalah 1. Sesuai dengan PG maka IPG APK pada jenjang SD sebesar 0,95, jenjang SMP 1,08 dan jenjang SM 1,07. Kesenjangan dalam hal sekolah swasta dan negeri maka kesetaraan terbesar pada jenjang SM untuk memperoleh siswa sebesar 13,15% sedangkan terkecil pada jenjang SD sebesar 9,02%.

Tabel 4.8
Kinerja Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K4
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM
1	Perbedaan Gender APK (PG APK)	93,31	96,35	94,99
2	Indeks Paritas Gender APK (IPG APK)	94,52	92,94	93,27
3	Persentase Siswa Swasta (%S-Swt)	98,00	19,41	27,73
	Kinerja Kesetaraan	95,27	69,57	72,00

Berdasarkan standar untuk konversi yang terdapat pada Tabel 2.1 maka indikator kesetaraan layanan telah dikonversi menjadi nilai kesetaraan yang terdapat pada Tabel 4.8. Nilai kesetaraan paling ideal adalah 100 dan paling buruk adalah 0, kemudian dengan mengambil rata-rata nilai ke-3 indikator tersebut dihasilkan kinerja kesetaraan layanan SD, layanan SMP, dan layanan SM.

PG APK Kabupaten Kapuas Hulu setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 93,31 Jenjang SMP menjadi 96,35 dan jenjang SM menjadi 94,99. IPG APK untuk jenjang SD menjadi 94,52 jenjang SMP 92,94 dan jenjang SM menjadi 93,27. %S-Swt setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 98,00 jenjang SMP 19,41 dan jenjang SM menjadi 27,73.

Dengan demikian, kinerja kesetaraan layanan jenjang SD menjadi 95,27 jenjang SMP menjadi 69,57 dan jenjang SM menjadi 72,00. Dalam kesetaraan dalam memperoleh layanan ternyata jenjang SD yang terbaik dan jenjang SMP yang terburuk.

E. Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K5

Untuk dapat melihat kepastian memperoleh layanan pendidikan maka digunakan empat ukuran, yaitu seberapa banyak siswa mendapat kepastian dilayani pendidikan melalui APM dan APK, sejauh mana akses masuk sekolah melalui AMM dan siswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui AM, sejauh mana siswa dapat bertahan di sekolah melalui AB5/AB, dan sejauh mana siswa dapat lulus dengan tepat waktu melalui RLB.

Berdasarkan Tabel 4.9 dan Grafik 4.6 digunakan dua partisipasi, yaitu APM dan APK. APM idealnya adalah 100%. APM Kabupaten Kapuas Hulu terbesar pada jenjang SD sebesar 118,86% dan terkecil pada jenjang SM sebesar 47,70%. Hal ini berarti bahwa siswa yang bersekolah sesuai dengan usia resmi dan berada di jenjang yang sesuai hanya mencapai 118,86% di jenjang SD, 59,39% di jenjang SMP, dan 47,70% di jenjang SM. APK bisa mencapai lebih dari 100% karena siswa semua usia sekolah yang berada di jenjang tertentu berbeda dengan usia siswa yang berada di sekolah. Berdasarkan perhitungan APK, ternyata APK tertinggi juga terdapat pada jenjang SD sebesar 118,86% sedangkan yang terendah pada jenjang SM sebesar 71,87%. Lebih rendahnya APK di jenjang SM menunjukkan partisipasi yang rendah jika dibandingkan dengan jenjang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jenjang SD mempunyai kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan jenjang SMP dan jenjang SM karena anak yang bersekolah di jenjang SD paling banyak jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan

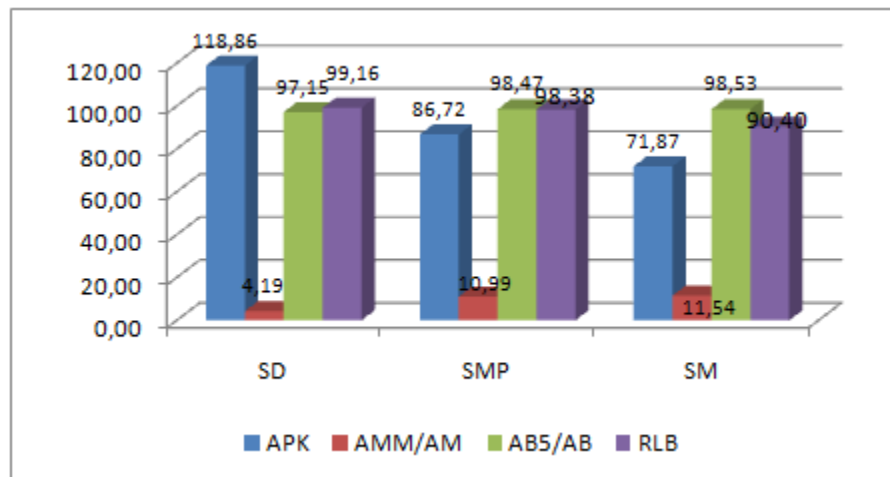
lainnya yang lebih tinggi.

Tabel 4.9
Indikator Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Misi K5
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM
1	Angka Partisipasi Murni (APM)	118,86	59,39	47,70
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	118,86	86,72	71,87
3	Angka Masukan Murni (AMM)/ Angka Melanjutkan (AM)	4,19	10,99	11,54
4	Angka Bertahan tingkat V (AB5)/ Angka Bertahan (AB)	97,15	98,47	98,53
5	Rata2 Lama Belajar (RLB)	6,05	3,05	3,32

Sumber: Sheet TabGrafMisi

Grafik 4.6
Indikator Kepastian Layanan Pendidikan
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafMisi

AB idealnya adalah 100%. Pada kenyataannya, AB5 jenjang SD sebesar 97,15%, berarti belum ideal, sedangkan AB jenjang SMP dan SM masing-masing sebesar 98,47% dan 98,53% mendekati ideal.

RLB jenjang SD yang ideal sebesar 6, sedangkan jenjang SMP dan SM yang ideal sebesar 3 tahun. RLB pada jenjang SD sebesar 6.05 tahun belum mendekati ideal walaupun belum sesuai standar dan RLB jenjang SMP dan SM masing-masing sebesar 3.05 dan 3.32 tahun karena siswa lulus tidak tepat waktu akibat adanya siswa yang mengulang sehingga terdapat beberapa siswa yang lulus tepat waktu, lebih lama 1 tahun, atau lebih lama 2 tahun.

Tabel 4.10
Kinerja Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Misi K5
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	100,00	75,41	62,49
2	Angka Masukan Murni (AMM)/ Angka Melanjutkan (AM)	7,62	100,00	100,00
3	Angka Bertahan tingkat V (AB5)/ Angka Bertahan (AB)	100,00	98,47	98,53
4	Rata2 Lama Belajar (RLB)	99,16	98,38	90,40
	Kinerja Kepastian	76,69	93,07	87,85

Sumber: Sheet TabGrafKinerja

Berdasarkan standar untuk konversi yang terdapat pada Tabel 2.1 maka indikator kepastian layanan telah dikonversi menjadi nilai kepastian yang terdapat pada Tabel 4.10. Nilai kepastian paling ideal adalah 100 dan paling buruk adalah 0, kemudian dengan mengambil rata-rata nilai ke-4 indikator tersebut dihasilkan kinerja kepastian layanan SD, layanan SMP, dan layanan SM.

APK Kabupaten Kapuas Hulu konversi untuk jenjang SD menjadi 100 Jenjang SMP menjadi 75,41 dan jenjang SM menjadi 62,49. AB5 SD setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 100, AB jenjang SMP menjadi 98,47 Dan AB jenjang SM menjadi 98,53. RLB SD setelah konversi untuk jenjang SD menjadi 99,16. AB jenjang SMP menjadi 98,47. Dan AB jenjang SM menjadi 98,53.

Dengan demikian, kinerja kepastian layanan jenjang SD menjadi 76,69, jenjang SMP menjadi 93,07, dan jenjang SM menjadi 87,85. Dalam kepastian memperoleh layanan pendidikan ternyata jenjang SMP yang terbaik dan jenjang SD yang terburuk.

F. Kinerja Dikdasmen

Gabungan dari kelima misi pendidikan maka dihasilkan kinerja dikdasmen menurut misi pendidikan 5K dan jenjang pendidikan. Selain itu, dengan mendasarkan pada Tabel 2.2 maka kinerja dikdasmen diberikan kategori kinerja.

Tabel 4.11
Kinerja Dikdasmen berdasarkan Misi Pendidikan 5K
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

No.	Jenis Kinerja	SD	SMP	SM	Dikdasmen	Jenis
1	Kinerja Ketersediaan	48,69	68,23	55,71	57,54	KURANG
2	Kinerja Keterjangkauan	66,67	66,67	60,91	64,75	KURANG
3	Kinerja Kualitas	32,63	39,57	32,65	34,95	KURANG
4	Kinerja Kesetaraan	95,27	69,57	72,00	78,95	KURANG
5	Kinerja Kepastian	76,69	93,07	87,85	85,87	MADYA
	Kinerja	63,99	67,42	61,82	64,41	KURANG
	Jenis Kinerja	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	

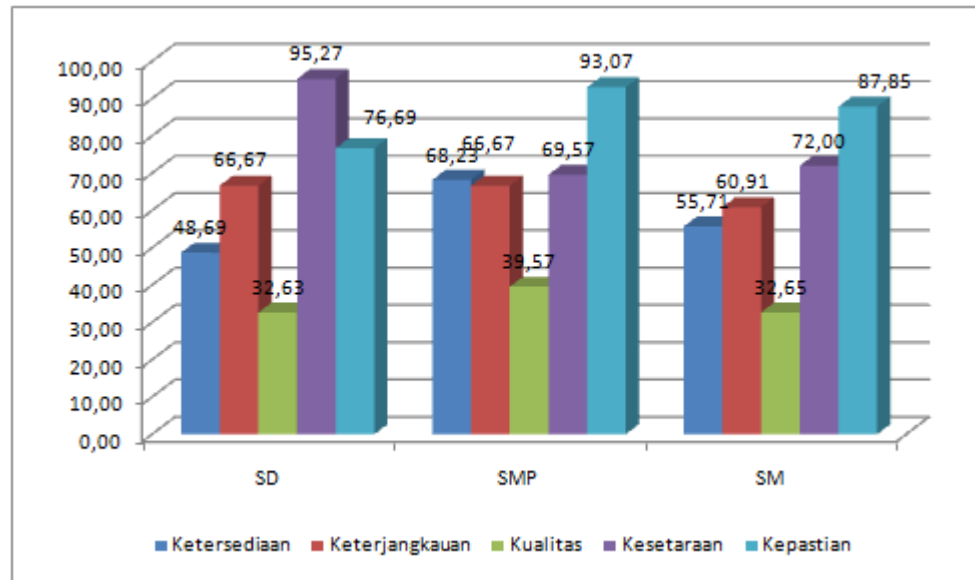
Sumber: Sheet TabGrafKinerja

Berdasarkan Tabel 4.11 dan Grafik 4.7 diketahui bahwa Kabupaten Kapuas Hulu untuk misi K1 ketersediaan layanan pendidikan jenjang SMP terbaik dengan nilai sebesar 68,23 dan terburuk adalah jenjang SD dengan nilai sebesar 48,69 sehingga untuk layanan dikdasmen tercapai sebesar 57,54 termasuk kategori kurang. Untuk misi K2 maka keterjangkauan jenjang SD dan SMP yang terbaik dengan nilai sebesar 66,67 dan terburuk adalah jenjang SM dengan nilai sebesar 60,91 sehingga dikdasmen tercapai sebesar 64,75 termasuk kategori kurang. Untuk misi K3 maka kualitas jenjang SMP yang terbaik dengan nilai sebesar 39,57 dan jenjang SD yang terburuk dengan nilai sebesar 32,63 sehingga untuk kualitas layanan dikdasmen tercapai sebesar 34,95 termasuk kategori kurang. Untuk misi K4 maka kesetaraan jenjang SD yang terbaik dengan nilai sebesar 95,27 dan terburuk adalah jenjang SMP dengan nilai sebesar 69,57 sehingga kesetaraan dikdasmen tercapai sebesar 78,95 termasuk kategori kurang. Untuk misi K5 maka kepastian jenjang SMP yang terbaik dengan nilai sebesar 93,07 dan terkecil adalah jenjang SD dengan nilai sebesar 76,69 sehingga kepastian layanan untuk dikdasmen tercapai sebesar 85,87 termasuk kategori madya.

Dengan mengambil rata-rata misi pendidikan 5K maka dapat dilihat kinerja pendidikan menurut jenjang pendidikan. Jenjang SD mempunyai nilai terbaik untuk misi Kinerja Kesetaraan dan nilai terburuk untuk misi Kinerja Kualitas, sehingga kinerja jenjang SD menjadi 63,99 termasuk kategori kurang. Jenjang SMP mempunyai nilai terbaik untuk misi Kinerja Kepastian dan nilai terburuk untuk misi Kinerja Kualitas, sehingga kinerja jenjang SMP menjadi 67,42 termasuk kategori kurang. Jenjang pendidikan SM mempunyai nilai terbaik untuk misi Kinerja Kepastian dan nilai terburuk untuk misi Kinerja Kalitas, sehingga kinerja jenjang SM menjadi 61,82 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, dikdasmen mempunyai nilai terbaik pada misi Kesetaraan Kepastian dan nilai terburuk untuk misi Kinerja Kualitas sehingga kinerja dikdasmen sebesar 64,41 termasuk kinerja kategori kurang.

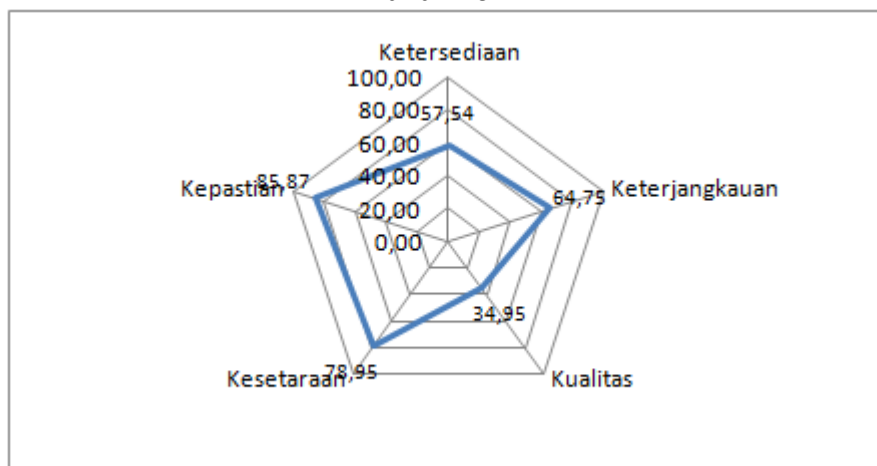
Hasilnya menunjukkan bahwa jenjang SMP yang terbaik dengan nilai sebesar 67,42 termasuk kategori kurang dan terburuk adalah jenjang SM sebesar 61,82 termasuk kategori kurang, sedangkan jenjang SD sebesar 63,99 termasuk kategori kurang sehingga untuk dikdasmen tercapai sebesar 64,41 termasuk kategori kurang.

Grafik 4.7
Kinerja Dikdasmen Berdasarkan Misi 5K dan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafKinerja

Grafik 4.8
Kinerja Dikdasmen Berdasarkan Misi K5
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017

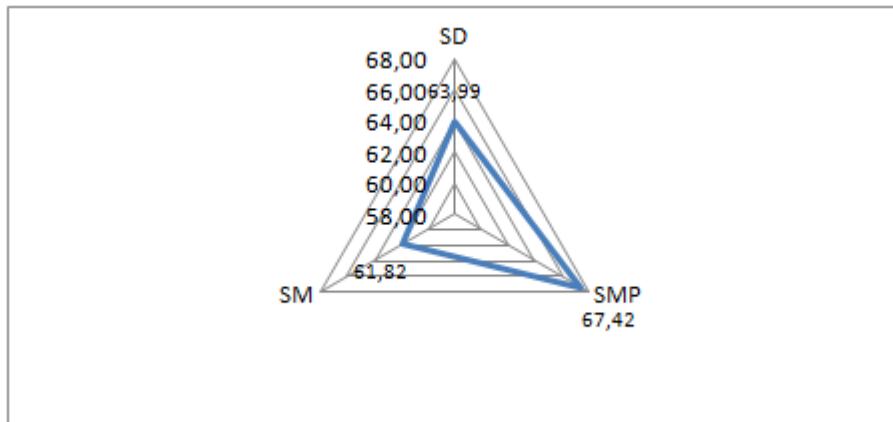


Sumber: Sheet TabGrafKinerja

Hal yang sama dengan jenjang pendidikan maka kinerja dikdasmen berdasarkan misi pendidikan 5K dapat lebih jelas terlihat menggunakan grafik sarang laba-laba pada Grafik 4.8, menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Kapuas Hulu, misi Kualitas yang

terburuk sebesar 34,95 termasuk kategori kurang dan misi Kesetaraan yang terbaik sebesar 78,95 termasuk kategori kurang.

Grafik 4.9
Kinerja Dikdasmen Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2017



Sumber: Sheet TabGrafKinerja

Dengan demikian, kinerja misi pendidikan 5K menurut jenjang pendidikan dapat lebih jelas terlihat menggunakan sarang grafik laba-laba pada Grafik 4.9, menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu jenjang SD yang terbaik sebesar 63,99 dan jenjang SMP yang terburuk sebesar 67,42.

BAB V

PENUTUP

Pada akhir laporan profil pendidikan yaitu pada Bab V dijelaskan tentang simpulan yang dapat diambil dari kinerja yang ada dari pendidikan dasar sampai menengah. Berdasarkan simpulan tentang pendidikan dasar dan menengah maka dapat disusun saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan kinerja pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Kapuas Hulu.

A. Simpulan

Berdasarkan data yang terdapat dalam profil pendidikan dan kajian terhadap hasil indikator pendidikan seperti ketersediaan, kesetaraan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian layanan pendidikan serta kinerja pendidikan maka dapat disimpulkan seperti berikut ini.

1. Ketersediaan Layanan Pendidikan: Misi K1

Berdasarkan indikator ketersediaan layanan pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu maka indikator R-S/Sek terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. R-S/K terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. R-K/RK terbaik pada jenjang SD dan terburuk pada jenjang SM. Dalam kaitan dengan prasarana sekolah maka untuk %perpus terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. %RUKS terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. %RKom terbaik pada jenjang SMP dan terburuk pada jenjang SD. %lab terbaik pada jenjang SMP dan terburuk pada jenjang SM.

Nilai ketersediaan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang SD yang terbaik pada indikator rasio siswa persekolah dan terburuk pada indikator persentase laboratorium sehingga kinerja ketersediaan SD menjadi 48,69 termasuk kinerja kategori kurang. Nilai ketersediaan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang SMP yang terbaik pada indikator rasio siswa persekolah dan terburuk pada indikator tempat olahraga sehingga kinerja ketersediaan SMP menjadi 68,23 termasuk kinerja kategori kurang. Nilai ketersediaan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang SM yang terbaik pada indikator rasio siswa per sekolah dan terburuk pada indikator rasio kelas per ruang kelas sehingga kinerja ketersediaan SM menjadi 55,71 termasuk kinerja kategori kurang.

2. Kesetaraan Layanan Pendidikan: Misi K2

Berdasarkan indikator keterjangkauan layanan pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu maka indikator TPS terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. DT terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. Nilai keterjangkauan layanan pendidikan pada jenjang SD yang terbaik pada indikator daerah terjangkau dan terburuk pada indikator tingkat pelayanan sekolah sehingga kinerja keterjangkauan SD menjadi

66,67 termasuk kinerja kategori kurang. Nilai keterjangkauan layanan pendidikan pada jenjang SMP yang terbaik pada indikator daerah terjangkau dan terburuk pada indikator tingkat pelayanan sekolah sehingga kinerja keterjangkauan SMP menjadi 66,67 termasuk kinerja kategori kurang. Nilai keterjangkauan layanan pendidikan pada jenjang SM yang terbaik pada indikator daerah terjangkau dan terburuk pada indikator tingkat pelayanan sekolah sehingga kinerja keterjangkauan SM menjadi 60,91 termasuk kinerja kategori kurang.

3. Kualitas Layanan Pendidikan: Misi K3

Berdasarkan indikator ketersediaan layanan pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu indikator %GL terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. R-S/G terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. AL terbaik pada jenjang SMP dan terburuk pada jenjang SM. AU terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. APS terbaik pada jenjang SD dan terburuk pada jenjang SMP. Dalam kaitan dengan prasarana sekolah maka untuk %perpusb terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SMP. %RUKSb terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. %RKomb terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. %labb terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SMP.

Nilai kualitas layanan pendidikan pada jenjang SD yang terbaik pada indikator angka lulusan dan terburuk pada indikator persentase ruang UKS baik, persentase ruang computer baik, persentase tempat olahraga, dan persentase laboratorium baik sehingga kinerja kualitas SD menjadi 32,63 termasuk kinerja kategori kurang. Nilai kualitas layanan pendidikan pada jenjang SMP yang terbaik pada indikator angka lulusan dan terburuk pada indikator tempat olahraga sehingga kinerja kualitas SMP menjadi 39,57 termasuk kinerja kategori kurang. Nilai kualitas layanan pendidikan pada jenjang SM yang terbaik pada indikator angka lulusan dan terburuk pada indikator tempat olahraga sehingga kinerja kualitas SM menjadi 32,65 termasuk kinerja kategori kurang.

4. Kesenjangan Layanan Pendidikan: Misi K4

Berdasarkan indikator kesetaraan layanan pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu maka indikator PG APK terbaik pada jenjang SD dan terburuk pada jenjang SM. IPG APK terbaik pada jenjang SMP dan terburuk pada jenjang SD. %S-Swt terbaik pada jenjang SD dan terburuk pada jenjang SD.

Nilai kesetaraan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang SD yang terbaik pada indikator perbedaan gender APK dan terburuk pada indikator indeks paritas gender APK sehingga kinerja kesetaraan SD menjadi 95,27 termasuk kinerja kategori kurang. Nilai kesetaraan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang SMP yang terbaik pada indikator persentase siswa swasta dan terburuk pada indikator perbedaan gender APK sehingga kinerja kesetaraan SMP menjadi 69,57 termasuk kinerja kategori kurang. Nilai kesetaraan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang SM yang terbaik pada indikator persentase siswa swasta dan terburuk pada indikator perbedaan gender APK sehingga kinerja kesetaraan SM menjadi 72,00 termasuk kinerja kategori kurang.

5. Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan: Misi K5

Berdasarkan indikator kepastian layanan pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu maka indikator APM terbaik pada jenjang SD dan terburuk pada jenjang SM. APK terbaik pada jenjang SD dan terburuk pada jenjang SM. Angka Bertahan terbaik pada jenjang SM dan terburuk pada jenjang SD. RLB terbaik pada jenjang SD dan SMP sedangkan terburuk pada jenjang SM.

Nilai kepastian memperoleh layanan pendidikan pada jenjang SD yang terbaik pada indikator APM dan APK sedangkan yang terburuk pada indikator angka bertahan sehingga kinerja kepastian SD menjadi 76,69 termasuk kinerja kategori kurang. Nilai kepastian memperoleh layanan pada jenjang SMP yang terbaik pada indikator angka bertahan dan terburuk pada indikator APM sehingga kinerja kepastian SMP menjadi 93,07 termasuk kinerja kategori kurang. Nilai kepastian memperoleh layanan pada jenjang SM yang terbaik pada indikator angka bertahan dan terburuk pada indikator APM sehingga kinerja kepastian SM menjadi 87,85 termasuk kinerja kategori kurang.

6. Kinerja Dikdasmen Berdasarkan Misi Pendidikan 5K

Berdasarkan indikator dari kelima misi pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu maka kinerja SD yang terbaik pada misi Kinerja Kesetaraan dan terburuk pada misi Kinerja Kualitas sehingga kinerja SD sebesar 63,99 termasuk kategori kurang.. Kinerja SMP yang terbaik pada misi Kinerja Kesetaraan dan terburuk pada misi Kinerja Kualitas sehingga kinerja SMP sebesar 67,42 termasuk kategori kurang. Kinerja SM yang terbaik pada misi Kinerja Kesetaraan dan terburuk pada misi Kinerja Kualitas sehingga kinerja SM sebesar 61,82 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, kinerja jenjang SMP sebesar 67,42 yang terbaik dan jenjang SM sebesar 61,82 yang terburuk.

B. Sarana

Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa saran yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- 1. Kinerja jenjang SD yang terburuk pada misi kinerja kualitas karena termasuk kinerja kategori kurang, untuk perlu peningkatan pada indikator persentase guru layak, persentase ruang kelas baik, persentase perpustakaan baik, persentase ruang UKS baik, persentase ruang komputer baik, persentase tempat olahraga baik yang memiliki nilai kurang dari 50. Peningkatan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara guru harus memiliki ijazah S1 dan Pembangunan Pendidikan secara bertahap.*
- 2. Kinerja jenjang SMP yang terburuk pada misi kinerja kualitas karena termasuk kinerja kategori kurang, untuk perlu peningkatan pada indikator persentase ruang kelas baik, persentase perpustakaan baik, persentase ruang UKS baik, persentase ruang komputer baik, persentase tempat olahraga baik yang memiliki nilai kurang dari 50. Peningkatan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara Pembangunan Pendidikan secara bertahap.*

3. *Kinerja jenjang SM yang terburuk pada misi kinerja kualitas karena termasuk kinerja kategori kurang, untuk perlu peningkatan pada indikator persentase ruang kelas baik, persentase perpustakaan baik, persentase ruang UKS baik, persentase ruang komputer baik, persentase tempat olahraga baik yang memiliki nilai kurang dari 50. Peningkatan tersebut dapat dilaksanakan dengan cara Pembangunan Pendidikan secara bertahap.*
4. *Bila nilai-nilai yang kurang dapat dipenuhi dengan cara tertentu maka diharapkan kinerja jenjang SD, SMP, dan SM akan meningkat.*

DAFTAR PUSTAKA (contoh fiktif)

Bappeda Provinsi. (2013). Profil Provinsi 2012. Jakarta: Bagian Publikasi DKI Jakarta

Kotamadya Jakarta Barat. (2013). Kotamadya Jakarta Barat dalam Angka 2012. Jakarta: Percetakan Barat

Kanwil Depag. (2013). Statistik Madrasah Tahun 2012/2013. Jakarta: Grasia

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. (2013). Statistik Persekolahan Tahun 2012/2013. Jakarta: Agape Ekspres

Pemerintah Provinsi. (2013). Provinsi Dalam Angka 2012. Jakarta: Percetakan Negara

Pemerintah Provinsi. (2010). Rencana Strategi Provinsi DKI Jakarta 2010-2014. Jakarta: Percetakan Pusat

LAMPIRAN

Isi dengan Tabel Data per Kecamatan yang ingin ditampilkan